



**Implementasi Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Aplikasi
E-SPTPD Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pemalang**

TUGAS AKHIR

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

Oleh :

Dewi Candra Wulan

NPM: 4218300011

Diajukan Kepada :

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2021

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya Dewi Candra Wulan, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri untuk memperoleh gelar dan bukan merupakan hasil plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Karya ini milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada pada saya,

Tegal, Juli 2021



Dewi Candra Wulan

HALAMAN PENGESAHAN

Implementasi Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Aplikasi E-SPTPD Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Pemalang

Tugas Akhir

Oleh :

Dewi Candra Wulan

NPM : 4218300011

Disetujui Oleh Pembimbing

Tegal,

Juli 2021

Mengetahui:

Dekan



Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M. Akt, CA.
NIDN. 0628117502

Dosen Pembimbing

Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M.
NIDN. 0616058002

PENGESAHAN UJIAN TAHAP AKHIR

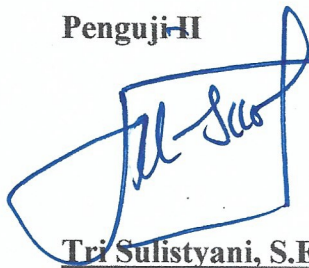
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul
“Implementasi Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Aplikasi E-SPTPD Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang” yang diajukan oleh Dewi Candra Wulan, NPM 4218300011 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Penguji I



Dr. H. Tabrani, M.M.
NIDN. 0612126001

Penguji-II



Tri Sulistyani, S.E., M.M.
NIDN. 0602036802

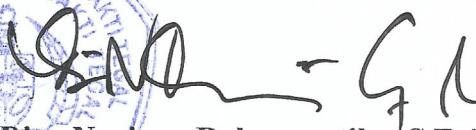
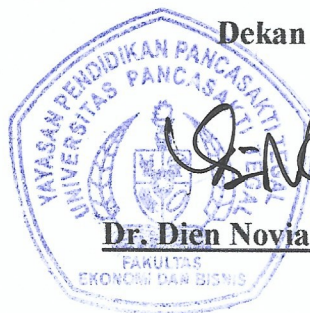
Penguji III



Dewi Indriasih, S.E., M.M.
NIDN. 0616058002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Noviany Rahmawatika, S.E., M.M., Akt., C.A.
NIDN. 0628117502

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir ini tepat pada waktunya. Proposal Tugas akhir ini dibuat sebagai syarat untuk membuat Tugas Akhir di Program Diploma III Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

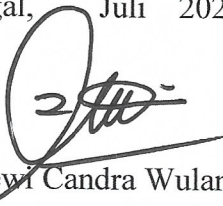
Proposal Tugas Akhir ini mungkin tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari pihak-pihak tertentu, maka dari saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dien Noviany R, SE., MM., Akt., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2. Mei Rani Amalia, SE., MM. Selaku Kepala Program Studi Manajemen Perpajakan.
3. Dr. Dewi Indriasih, SE., MM. Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir.
4. Keluarga saya yang telah memberikan dukungan kepada saya khususnya dukungan dalam segi materi.
5. Dan semua pihak yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu saya dalam penyelesaian Proposal Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa proposal tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, saran dan segala bentuk pengarahannya dari semua pihak untuk perbaikan proposal tugas akhir ini.

bentuk pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan proposal tugas akhir ini. Penulis berharap bahwa nantinya proposal tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan.

Tegal, Juli 2021



Dewi Candra Wulan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jika kamu tidak mau bekerja keras jangan harap kamu akan mendapat hasil yang baik dimasa depan” (Jung Hoseok)

“Lakukan apa yang ingin kamu lakukan dan pilih sendiri jalan yang ingin kamu lalui” (Park Jimin)

“Jangan pernah menyimpan dendam dan ambil pelajaran berharga yang bisa kamu ambil dari setiap rasa sakit yang kamu rasakan” (Kim Taehyung)

“Tidak penting siapa dirimu, darimana kamu berasal, warna kulitmu, identitas gendermu, ekspresikan dirimu” (Kim Namjoon)

“Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi namun kerja keras yang akan menentukan kemana kita akan pergi” (Jeon Jungkook)

“Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa seperti kau tidak pantas mendapatkan apa yang kau inginkan.” (Kim Seokjin)

“Pekerjaan hebat dilakukan bukan dengan kekuatan tetapi dengan ketekunan” (Min Yoongi)

Persembahan:

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Keluarga Saya yang senantiasa mendoakan, memotivasi, serta membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini khususnya membantu dalam segi materi.

2. Seluruh Dosen DIII Manajemen Perpajakan yang sudah membantu saya selama berkuliah di Universitas Pancasakti Tagal.
3. Dewi Candra Wulan Terimakasih karena sudah mau berjuang sejauh ini, terimakasih karena selalu kuat dan selalu berusaha menjadi yang terbaik.
4. Rizal Fauzi, Riska Aulia Safitri, Afiatul Munasifah sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini
5. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, BTS yang selalu memotivasi saya lewat karya-karya mereka.
6. Seluruh Staff Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pematang Jaya yang telah membantu dan mengajari saya sewaktu KKP.
7. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TAHAP AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
D. Metode Pengumpulan Data	9
BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI	
A. Sejarah Bapenda Kabupaten Pematang	10
B. Visi dan Misi Bapenda Kabupaten Pematang	11
C. Struktur Organisasi Bapenda.....	12
D. Tugas Pokok	14
E. Kepegawaian	27
F. Jenis-jenis Pelayanan di Bapenda	27

G. Sistem pemungutan Pajak di Bapenda	28
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. Tinjauan Teori	29
B. Praktek	52
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Sasaran dan Capaian PAD	3
1.2 Hasil Penerimaan Pajak Daerah	4
2.1 Pejabat Bapenda	13
2.2 Uraian Tugas Pokok	14
2.3 Jumlah Pegawai Bapenda	27
3.1 Tarif Pajak Penghasilan	35
3.2 Pembagian Pajak Daerah	40
3.3 Target dan Realisasi Pajak Restoran	53
3.4 Penerimaan Pajak Restoran Masa 2020	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Struktur Organisasi Bapenda	12
2.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah	28
3.1 Dashboard E-SPTPD	49
3.2 Halaman Menu lapor Pajak	50
3.3 Halaman Cetak Laporan	51
3.4 Halaman Ubah Password	51
3.5 Grafik Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran	54
3.6 Halaman E-SPTPD	57
3.7 Kolom Login E-SPTPD	57
3.8 Dashboard E-SPTPD	58
3.9 Menu Lapor Pajak	58
3.10 Sub Menu Pajak Restoran	59
3.11 Laman Data Objek Pajak	59
3.12 Menu Lapor Pajak	60
3.13 Menu Untuk Melaporkan SPTPD	60
3.14 Form Laporan SPTPD	61
3.15 Pilihan Menu Untuk Cetak	62
3.16 Alur Pelayanan Wajib Pajak Baru	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

I.	Daftar Pertanyaan Wawancara	77
II.	Data Wajib Pajak Restoran Bulan September	78
III.	Lembar SPOP Pajak Restoran	89
IV.	Ketentuan NPWPD	90
V.	Lembar SPTPD	91
VI.	Lembar SSPD	92
VII.	Lembar STPD	93
VIII.	Lembar Kode Bayar	94
IX.	Laman E-SPTPD	95
X.	Laman E-SIMPATDA.....	96
XI.	Realisasi PAD Tahun 2020	97

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia membutuhkan dana, potensi alam, dan potensi manusia untuk mendanai fungsi penyelenggaraan pemerintah. Selain potensi alam Indonesia, dana modal juga berasal dari keuntungan BUMN, royalti pemerintah, pungutan, iuran, bea, sanksi, denda, dan pajak, yang mengharuskan warga agar ikut serta dalam menjalankan fungsinya. Fungsi keadilan masyarakat merupakan fungsi perpajakan yang berkaitan dengan fungsi ekonomi pemerintah, dan pajak yang ditarik dari masyarakat yang berkecukupan akan dapat menciptakan kesejahteraan seluruh masyarakat (Rahayu, 2010).

Pajak adalah salah satu bentuk manifestasi peran aktif masyarakat yang secara langsung memenuhi kewajiban perpajakannya yang diperlukan bagi pendanaan dan pembangunan nasional, sebagai sumber penghasilan negara yang berlandaskan undang-undang iuran pajak dari masyarakat pemungutannya dipaksakan oleh Pemerintah (Watini, 2010).

Dalam pajak terdiri atas dua fungsi yaitu sebagai sumber perolehan dan penerimaan negara untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara atau disebut dengan Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), dan Fungsi pajak yang kedua adalah Fungsi Mengatur (*Reguler*) dengan fungsi ini pertumbuhan ekonomi dapat diatur oleh pemerintah dengan membuat kebijakan pajak, fungsi ini juga

dapat dipakai sebagai instrumen untuk mencapai tujuan, sebagai contohnya jika pemerintah menginginkan peningkatan penanaman modal di Indonesia pemerintah dapat menggunakan fungsi ini untuk membuat kebijakan perpajakan yang dapat meringankan pajak bagi para pemilik modal. Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut dapat menarik investor masuk ke Indonesia (Mardiasmo, 2018:4).

Menurut institusi pemungutnya pajak diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yakni Pajak Pusat (Pajak Negara) serta Pajak Daerah. Pajak Pusat ditarik dan dikukuhkan Pemerintah Pusat, dipakai untuk mendanai pengeluaran negara seperti keperluan pembangunan yang keseluruhannya dimuat dalam APBN (Resmi, 2014:8).

Pajak Daerah ialah jenis pajak yang dikukuhkan Pemerintah Daerah sesuai tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) yang hak pungutannya dijalankan Pemerintah Daerah, kemudian hasil penerimaannya akan diutamakan guna mendanai belanja pemerintah daerah, pemeliharaan serta pengembangan pembangunan daerah. Pajak Daerah diklasifikasikan dalam dua kategori yakni Pajak Daerah Provinsi digunakan untuk mensubsidi keperluan Pemerintah Provinsi, selanjutnya Pajak Daerah Kabupaten/Kota digunakan bagi pembiayaan keperluan Daerah kabupaten/kota (Siahaan, 2010:10).

Kabupaten Pematang sebagai daerah otonom dianggap mampu melaksanakan pembangunan serta menjalankan pemerintahan. Untuk dapat menjalankan pemerintahannya dan merealisasikan pembangunan diperlukan anggaran yang memadai, selain itu perlu mengandalkan kemampuan daerah itu sendiri meski

pemerintah pusat tetap memberikan bantuan kepada daerah tersebut. Jadi, Pemerintah Kabupaten Pemalang mengupayakan pengoptimalan semua sumber penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) (Muyasyaroh, 2019).

Di bawah ini tabel realisasi dan target Pendapatan Asli (PAD) Kabupaten Pemalang dalam rentang waktu 2015-2020

Tabel 1.1
Sasaran dan Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang
Tahun 2015-2020

Tahun	Sasaran	Capaian	Efektifitas
2015	Rp209.093.274.000,00	Rp230.413.326.865,00	110,20%
2016	Rp246.679.817.000,00	Rp275.402.554.016,00	111,64%
2017	Rp405.333.931.000,00	Rp425.893.266.850,00	105,07%
2018	Rp275.431.369.000,00	Rp300.481.887.079,00	109,07%
2019	Rp297.132.162.000,00	Rp350.559.139.753,00	117,98%
2020	Rp292.672.718.000,00	Rp311.455.681.803,00	106,42%

Sumber Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang

Bersumber dari Tabel 1.1 tampak setiap tahunnya pendapatan asli daerah realisasinya selalu melebihi target penerimaan kecuali pada tahun 2018,

pada tahun 2018 Target dan realisasinya mengalami penurunan yang cukup besar. Untuk targetnya terjadi penurunan sebesar Rp129.431.369.000,- dan realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp125.411.379.771,-.

Tabel 1.2
Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016-2020

Jenis Pajak	Tahun Pajak				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Hotel	Rp308,953,100	Rp374,277,400	Rp503,123,200	Rp525,118,500	Rp500,376,850
Pajak Restoran	Rp694,258,585	Rp796,537,585	Rp1,144,293,387	Rp1,404,726,051	Rp1,138,628,930
Pajak Reklame	Rp1,321,627,781	Rp1,430,172,113	Rp1,3036,561,438	Rp1,428,352,981	Rp1,317,148,645
Pajak Parkir	Rp23,337,050	Rp32,323,950	Rp43,224,240	Rp53,171,850	Rp45,127,845
Pajak Air Tanah	Rp97,702,112	Rp112,424,725	Rp138,996,640	Rp151,028,400	Rp148,036,720

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pemalang

Melalui Tabel 1.2 tampak penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami degradasi sebesar Rp 87.577.426,00. Dapat diartikan Pajak Restoran berdampak penting bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang.

Pajak Restoran merupakan pungutan daerah atas jasa penjualan makanan serta minuman yang dinikmati konsumen langsung di restoran atau dilain tempat. Restoran merupakan layanan jasa penyaji makanan dan

minuman yang memungut biaya, mencakup juga kantin, kafetaria, kantin, rumah makan, termasuk juga katering atau jasa boga. Tarif dari Pajak Restoran senilai 10% (sepuluh persen) dengan asas pengenaannya adalah total pembayaran yang masuk dan didapat pihak restoran (Febriansyah, 2019).

Setiap pelayanan atau jasa yang disajikan pihak restoran termasuk servis penjualan makanan serta minuman yang dinikmati konsumen baik langsung direstoran atau dilain tempat dengan nilai pelayanan lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan disebut objek pajak restoran jika kurang dari nilai tersebut maka dikecualikan. Badan atau orang Pribadi (OP) yang membeli makanan serta minuman direstoran disebut subjek pajak restoran (Siahaan, 2010:330).

Sejak tahun 1984 perpajakan Indonesia sudah mempraktikan *system self assessment*. Pelaporan pajak melalui system ini menyerahkan tanggung jawab, kepercayaan, dan kekuasaan sepenuhnya pada wajib pajak, untuk menghitung, melaporkan juga menyetorkan besaran pajak yang menjadi tanggungannya sendiri. Sebagian pajak di Indonesia memakai system ini terutama pajak daerah, namun jenis pajak seperti PBB P2 masih memakai *official assessment system* (Waluyo, 2008:17).

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pematang Jaya membuat terobosan terbaru pada penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Mulai November 2018 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya memfasilitasi wajib pajak daerah Kabupaten

Pemalang untuk menyampaikan SPTPD secara *elektronik* (E-SPTPD). E-SPTPD sistem aplikasi berbasis *website* yang dipergunakan untuk melaporkan kewajiban pajak daerah secara *online* serta dapat di akses dimana saja. Sistem ini terkoneksi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Dalam Penerapan E-SPTPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan prosedur pelaporan SPTPD melalui sistem online pada saat peluncurannya 2018 lalu, namun banyak wajib pajak restoran baru yang belum mendapatkan sosialisasi yang cukup. Hal ini mengakibatkan banyaknya wajib pajak restoran baru yang masih mendatangi kantor Bapenda untuk meminta bantuan dalam pelaporan pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas untuk memahami prosedur pelaporan pajak restoran secara online melalui E-SPTPD penulis tertarik mengambil judul “Implementasi Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Aplikasi E-SPTPD Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang”

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam Tugas Akhir ini menitik beratkan pada pembahasan berikut;

1. Bagaimana prosedur pelaporan pajak restoran melalui aplikasi E-SPTPD Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang?

2. Apakah Kendala dalam pengimplementasian program E-SPTPD?
3. Apakah Manfaat Implementasi Program E-SPTPD bagi Wajib Pajak?
4. Apakah Sanksi pidana yang dikenakan bagi Wajib Pajak Restoran yang tidak menyampaikan SPTPD?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan dari Penulisan

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini merupakan:

- a. Untuk memahami Prosedure pelaporan pajak restoran melalui sistem E-SPTPD pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Pematang.
- b. Mengetahui Kendala dalam pengimplementasian Program E-SPTPD.
- c. Untuk Mengetahui Manfaat penerapan program E-SPTPD bagi Wajib Pajak.
- d. Mengetahui sanksi pidana yang akan diterima Wajib Pajak Restoran yang tidak melaporkan SPTPDnya.

2. Manfaat dari Penulisan

Berdasarkan tujuan yang ingin diraih, maka penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan dapat memberi faedah bagi pendidikan pajak yaitu manfaat seperti:

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penulisan ini dimaksudkan untuk bisa memberikan manfaat yaitu:

- 1) Memberikan kontribusi gagasan guna kumajuan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya pajak daerah.
- 2) Dapat Menambah Wawasan dan Pengetahuan mengenai Prosedur Pelaporan pajak restoran melalui sistem elektronik.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Guna memperbanyak keterampilan dan menambah pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan pelaporan pajak restoran secara online yakni dengan *website* E-SPTPD.

2) Bagi Universitas Pancasakti Tegal

Untuk memperbanyak serta memperkaya pustaka di Perpustakaan sehingga nantinya bias bermanfaat bagi pengajar dan mahasiswa dan dapat digunakan mahasiswa dan pengajar untuk mengetahui atau memahami proses pelaporan pajak restoran secara online.

3) Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Pemalang

Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pihak BAPPEDA yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber bacaan dan semoga dapat memotivasi para pegawai BAPPENDA untuk meningkatkan pelayanannya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diaplikasikan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini yaitu:

1. Metode Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tatap muka serta tanya jawab secara langsung penulis dan narasumber yang mengetahui juga memahami tentang informasi yang diperlukan penulis, Dalam hal ini yang berperan sebagai narasumber adalah pihak BAPENDA Kab. Pematang Jaya.

2. Metode Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data lewat pengamatan langsung objek yang menjadi target pada penelitian. Yaitu Penulis terjun langsung mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Praktek (KKP) di BAPENDA Kab. Pematang Jaya.

3. Metode Studi Pustaka

Studi Pustaka yakni teknik pengumpulan data melalui membaca, melihat lalu mengambil informasi yang relevan dari buku, dokumen, laporan penelitian, karya ilmiah dan lain sebagainya.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Bapenda

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang didirikan menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang disahkan pada tanggal 23 Agustus 2016. Peraturan Daerah tersebut menempatkan Bapenda sebagai Perangkat daerah tipe B yang melaksanakan tugas penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang finansial.

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Pada 17 Oktober 2016 ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 13 Tahun 2016. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 menetapkan Bapenda sebagai bagian pelaksana penunjang kegiatan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bertanggung jawab dan berada dibawah Bupati Kabupaten Pemalang lewat Sekretaris Daerah.

Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 tahun 2008 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang secara resmi hangus serta tidak diberlakukan kembali. Terdapat Perubahan cukup mendasar pada fungsi pengelolaan pendapatan, yang sebelumnya berada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

utamanya dalam Bidang Pendapatan, mengalami perubahan menjadi satu badan tersendiri menjadi lembaga daerah berbentuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Bapenda Kabupaten Pemalang mulai efektif melaksanakan kewajiban pokok dan fungsinya sejak 2 Januari 2017, ditandai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat struktural maupun penataan tenaga pelaksana pada pegawai daerah di Kabupaten Pemalang selaku penyelenggara Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016.

B. Visi dan Misi Bapenda

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang memiliki visi dan misi berikut:

1. Visi :

Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Daerah Melalui Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Transparan, Amanah, dan Profesional.

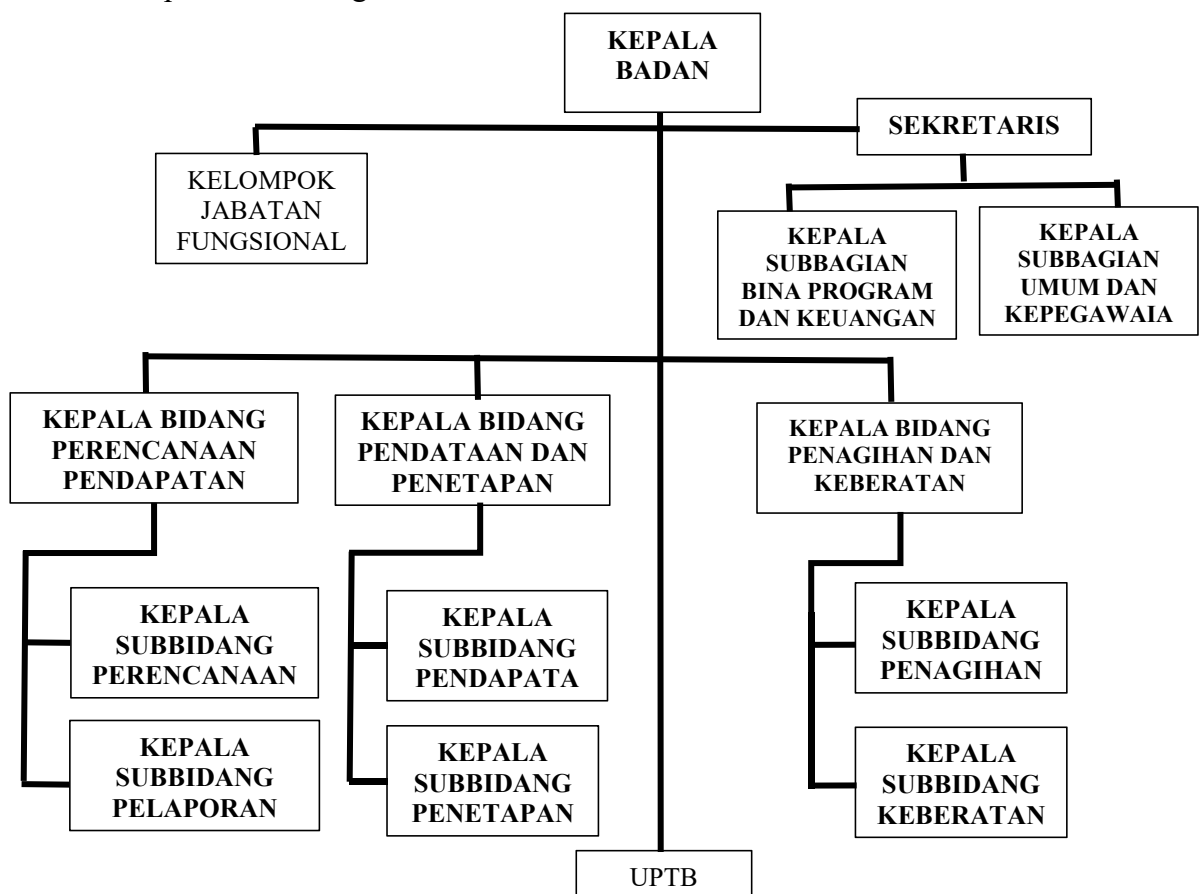
2. Misi :

- a.* Meningkatkan Transparansi, inovasi, dan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Berasas Teknologi;
- b.* Mengembangkan Sinergisme Seluruh *Stakeholder* Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
- c.* Meningkatkan Akurasi Basis Data dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
- d.* Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur di Bidang Pendapatan Asli Daerah.

- e. Menciptakan Layanan Pemungutan Pajak yang Transparan, Akuntabel, Mudah, Sederhana dan Ramah.

C. Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang

Struktur Organisasi ialah rancangan hubungan antara bagian-bagian atau tugas-tugas yang menunjukan kewajiban, kedaulatan, dan tanggung jawab yang berbeda dalam organisasi. Struktur Organisasi diperlukan agar dapat suatu organisasi dapat menjalankan organisasinya dengan sebaik-baiknya. Berikut ini Struktur Organisasi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Pemalang

Berikut ini pihak-pihak yang menduduki jabatan dalam Struktur Organisasi diatas:

Tabel 2.1
Pemegang Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pemalang

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Bapenda	Bejo Suwarno, S.IP. NIP. 19611125 198607 1 001
2	Sekretaris	Drs. Joko Ngatmo, M.Si. NIP. 19680825 199303 1 004
3	Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan	Eko Sulistyo Nugroho, S.E, M.M. NIP.19741129 199903 1 006
4	Kepala Subbidang Pendataan	Istianah, S.H. NIP.19690304 198903 2 008
5	Kepala Subbidang Penagihan	Suyatno, S.H. NIP.19640707 198702 1 003
6	Kepala Subbidang Penetapan	Suharno, S.IP. NIP.19640820 199112 1 001
7	Kepala Subbidang Keberatan	Suhartono, S.IP. NIP.19650922 199311 1 001
8	Kepala Subbidang Pelaporan	Bambang Eka Riyanto, S.E. NIP.19770628 200312 1 003
9	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan	Sri Murtini, S.IP. NIP.19640331 198603 2 004
10	Pengelola Pendapatan	Endang Purwani, S. IP. NIP.19630427 198612 2 001
11	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Martinah, SST. NIP.19681031 199803 2 002

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

D. Tugas Pokok

Sebagaimana Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, lewat Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 Mengenai Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dijabarkan bahwa masing-masing unsur pada organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang memiliki fungsi dan tugas-tugas seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Uraian Tugas Pokok Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Pemalang

No	Jabatan/Bidang	Tugas Pokok
1.	Kepala Bapenda	<p>a. Mengesahkan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) pengampu kegiatan-kegiatan Pemerintah Bidang Pengelolaan Pendapatan daerah dengan mengarah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaku petunjuk Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).</p> <p>b. Memformulasikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengarah pada</p>

		<p>Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan pemerintah bidang pengelolaan pendapatan daerah selaku panduan penyelenggaraan kegiatan.</p> <p>c. Memformulasikan rencana susunan strategi teknis pengelolaan pendapatan daerah sesuai program serta kegiatan bidang pengelolaan pendapatan daerah selaku panduan penerapan pengelolaan pendapatan daerah.</p> <p>d. Membimbing pelaksanaan kegiatan serta program bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pendapatan daerah supaya penyelenggaraannya sesuai pada target dan tujuan yang sudah ditetapkan.</p> <p>e. Mengesahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta memberi tindak lanjut pada permohonan keberatan atas besaran ketetapan pajak oleh wajib pajak sesuai tata cara penanganan pajak daerah sebagai dasar pengenaan pajak daerah.</p> <p>f. Berkoordinasi dengan pihak terkait tentang penyelenggaraan tugas Bapenda sesuai dengan</p>
--	--	---

		<p>Proker supaya target tercapai sesuai dengan perencanaan</p> <p>g. Sesuai dengan perkembangan teknologi kepala bapenda bertugas membuat inovasi dalam bidang pengelolaan penerimaan daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.</p> <p>h. Membimbing penyediaan pelayanan informasi publik yang berkenaan dengan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan penerimaan menurut hasil analisis dan/atau pendayagunaan teknologi bagi efektifitas penyelenggaraan pekerjaan dan menaikkan kualitas pelayanan masyarakat.</p> <p>i. Membimbing Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) penopang urusan pemerintahan bidang pengelolaan penerimaan daerah sesuai pada parameter Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dalam rangka menggapai target dan tujuan organisasi.</p> <p>j. Melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas penopang urusan pemerintahan bidang</p>
--	--	---

		<p>pengelolaan penerimaan daerah melalui rencana program serta kegiatan yang sudah disahkan dengan tujuan pembenahan kemampuan kerja.</p> <p>k. Menyusun laporan penyelenggaraan tugas penopang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah menurut statistik serta analisis sebagai informasi dan pertanggung jawaban penyelenggaraan tugas, dan</p> <p>l. Bertujuan tertib penyelenggaraan tugas kepala Bapenda harus menjalankan tugas kedinasan yang diperintahkan pimpinan sesuai tugas dan fungsi sebagai Kepala Bapenda.</p>
2.	Sekretaris	<p>a. Menyusun rencana program kegiatan kesekretariatan sesuai pada dokumen perencanaan sebagai materi perencanaan dokumen rencana kerja dan anggaran.</p> <p>b. Melakukan koordinasi pada usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja serta Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penunjang urusan pemerintahan bidang</p>

		<p>pengelolaan penerimaan daerah dengan mengarah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan, Renstra dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai panduan penyelenggaraan tugas.</p> <p>c. Sekretaris bertugas membuat susunan rencana kebijakan kesekretariatan sesuai pada program serta kegiatan sebagai panduan penyelenggaraan tugas.</p> <p>d. Melaksanakan program serta kegiatan Sub bagian Bina Program serta keuangan dan Sub bagian Umum serta Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) supaya pelaksanaannya sesuai target dan tujuan yang sudah ditetapkan.</p> <p>e. Pengkoordinasian penyediaan pelayanan informasi publik dan seluruh bidang /subbidang sesuai dengan undang-undang transparansi informasi publik dengan tujuan pemutahiran informasi publik.</p> <p>f. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Penunjang urusan pemerintah bidang pengelolaan pendapatan</p>
--	--	---

		<p>daerah sesuai pada parameter Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka penanggulangan intern kegiatan.</p> <p>g. Membuat rancangan inovasi kesekretariatan menurut pengenalan permasalahan dan analisis untuk efektifitas penyelenggaraan pekerjaan dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.</p> <p>h. Mengkoordinasikan konsep inovasi dan melakukan tugas bidang-bidang untuk keterpaduan penyelenggaraan tugas.</p> <p>i. Melakukan evaluasi pada penyelenggaraan program kegiatan kesekretariatan sesuai pada rencana program kegiatan yang sudah disahkan dalam upaya pembenahan kemampuan kerja.</p> <p>j. Melakukan koordinasi dalam pembuatan laporan penopang urusan pemerintahan bidang pengelolaan penerimaan daerah berdasarkan hasil laporan sebagai informasi serta pertanggung jawaban penyelenggaraan tugas dan,</p> <p>k. Menerima tugas kedinasan lain yang</p>
--	--	---

		diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib penyelenggaraan tugas.
3.	Bidang Perencanaan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat rencana program serta kegiatan untuk bidang perencanaan pendapatan sesuai yang tertera pada dokumen perencanaan sebagai materi pembuatan dokumen RKA. b. Membuat kerangka strategi teknis bidang perencanaan pendapatan sesuai peraturan mengenai pengendalian penerimaan daerah sesuai paduan penyelenggaraan pengendalian penerimaan daerah. c. Melaksanakan program serta kegiatan Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menopang kegiatan pelayanan masyarakat. d. Berkoordinasi dengan unit teknis mengenai kegiatan perhitungan potensi penerimaan daerah yang sesuai metode dan teknik perhitungan sebagai landasan penetapan sasaran perolehan daerah pada unit kerja masing-masing e. Menjalankan kegiatan pembuatan rencana

		<p>penerimaan daerah menurut hasil perhitungan potensi sebagai materi pembentukan anggaran pendapatan daerah.</p> <p>f. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai peraturan pajak dan retribusi daerah agar dapat meningkatkan pemasukan pendapatan daerah.</p> <p>g. Membuat laporan piutang pajak daerah akhir tahun seperti pada metode perhitungan saldo piutang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p> <p>h. Membentuk kerangka inivasi Bidang Perencanaan Pendapatan menurut pengenalan permasalahan serta analisis untuk efektifitas penyelenggaraan pekerjaan dan menaikkan kualitas pelayanan publik.</p> <p>i. Berkoordinasi mengenai penyelenggaraan fungsi dengan unit kerja terkait sesuai dengan keperluan lembaga untuk keselarasan penyelenggaraan fungsi.</p>
--	--	---

		<p>j. Melakukan evaluasi pada pengerjaan tugas Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan rencana program serta program yang sudah ditentukan dengan tujuan pembenahan kemampuan kerja.</p> <p>k. Membentuk susunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan Pendapatan secara tepat dengan maksud mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan</p> <p>l. Menjalankan tugas kedinasaan lain yang diperntahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas serta fungsi dalam rangka tertib penyelenggaraan tugas.</p>
4.	Bidang Pendataan dan Penetapan	<p>a. Membentuk rencana program serta kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan Sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai materi penyusunan dokumen rencana kerja serta rencana anggaran.</p> <p>b. Membuat kerangka strategi teknis Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai peraturan mengenai pengendalian penerimaan daerah selaku panduan penyelenggaraan pengendalian penerimaan daerah.</p>

		<p>c. Melaksanakan program serta kegiatan Bidang Pendapatan dan Penetapan seperti tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk menopang kegiatan pelayanan masyarakat.</p> <p>d. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah sesuai dengan metode pengendalian pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak.</p> <p>e. Melakukan verifikasi konsep nota perhitungan pajak yang menjadi tanggungan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), menurut Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), pada seluruh kategori pajak selaku dasar pengenaan besarnya pajak daerah.</p> <p>f. Membuat rancangan trobosan di Bidang Pendataan dan Penetapan menurut pengenalan persoalan dan analisis untuk efektifitas penyelenggaraan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.</p> <p>g. Berkoordinasi dengan unit kerja lain terkait</p>
--	--	--

		<p>pelaksanaan fungsi sesuai dengan keperluan organisasi untuk keselarasan pengerjaan tugas.</p> <p>h. Melakukan evaluasi pada pengerjaan tugas bidang pendataan dan penetapan dengan rencana program serta program yang sudah ditentukan dalam rangka pembenahan kemampuan kerja.</p> <p>i. Membentuk susunan laporan penyelenggaraan tugas bidang pendataan dan penetapan dengan tepat dan benar dengan tujuan pertanggung jawaban penyelenggaraan tugas dan,</p> <p>j. Menerima tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai pada tugas serta fungsi dalam rangka tertib pengerjaan tugas.</p>
5.	Bidang Penagihan dan Keberatan	<p>a. Membuat rencana kegiatan serta program Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai pada dokumen perencanaan sebagai materi pembuatan dokumen rencana kerja serta rencana anggaran.</p> <p>b. Membuat susunan strategi teknis Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai peraturan</p>

		<p>mengenai pengendalian penerimaan daerah sebagai panduan penyelenggaraan pengendalian penerimaan daerah.</p> <p>c. Menjalankan kegiatan serta program Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk menopang program penyedia layanan masyarakat.</p> <p>d. Melaksanakan kegiatan lelang sewa tanah, dana pendidikan grantungan milik Pemerintah Kabupaten Pematang sesuai jadwal yang telah ditentukan guna peningkatan pendapatan daerah.</p> <p>e. Melakukan verifikasi laporan piutang pajak daerah dan STPD secara teratur sebagai landasan dalam penyelenggaraan penagihan.</p> <p>f. Melakukan verifikasi pada rancangan laporan pengusulan permohonan cicilan retribusi serta keberatan dari wajib pajak dengan melakukan penelitian data dukungan yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil pertimbangan.</p> <p>g. Membina wajib pajak daerah untuk peningkatan kesadaran wajib pajak untuk taat membayar pajak daerah.</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> h. Membuat susunan rancangan inovasi bidang penagihan dan keberatan menurut pengenalan permasalahan dan analisi untuk efektifitas penyelenggaraan pekerjaan dan menaikkan kualitas pelayanan masyarakat. i. Berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait sesuai penyelenggaraan tugas dan keperluan organisasi untuk keselarasan penyelenggaraan tugas. j. Melakukan evaluasi pada penyelenggaraan tugas Bidang Penagihan dan Keberatan dengan rencana program serta kegiatan yang sudah dikukuhkan dengan tujuan pembenahan kemampuan kerja. k. Membentuk susunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Penagihan dan Keberatan secara efektif dengan bertujuan mempertanggung jawabkan tugas dan. l. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai pada tugas serta fungsi dalam rangka tertib menjalankan tugas.
--	--	--

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Pematang

E. Kepegawaian

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang memiliki 78 (Tujuh Puluh Delapan) Pegawai yang terdiri atas:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai BAPENDA Kabupaten Pemalang Pada Februari 2021
berdasarkan Status Kepegawaian dan Pangkat/Golongan:

No	STATUS	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	PNS	Golongan IV/C	1
		Golongan IV/B	1
		Golongan IV/A	1
		Golongan III/D	10
		Golongan III/C	4
		Golongan III/B	9
		Golongan III/A	8
		Golongan II/D	7
		Golongan II/C	10
		Golongan II/B	3
		Golongan II/A	1
		Golongan I/D	1
2.	PEGAWAI KONTRAK	-	22
TOTAL JUMLAH PEGAWAI			78

Sumber: BAPENDA Kab. Pemalang

F. Jenis-Jenis Pelayanan di Bapenda

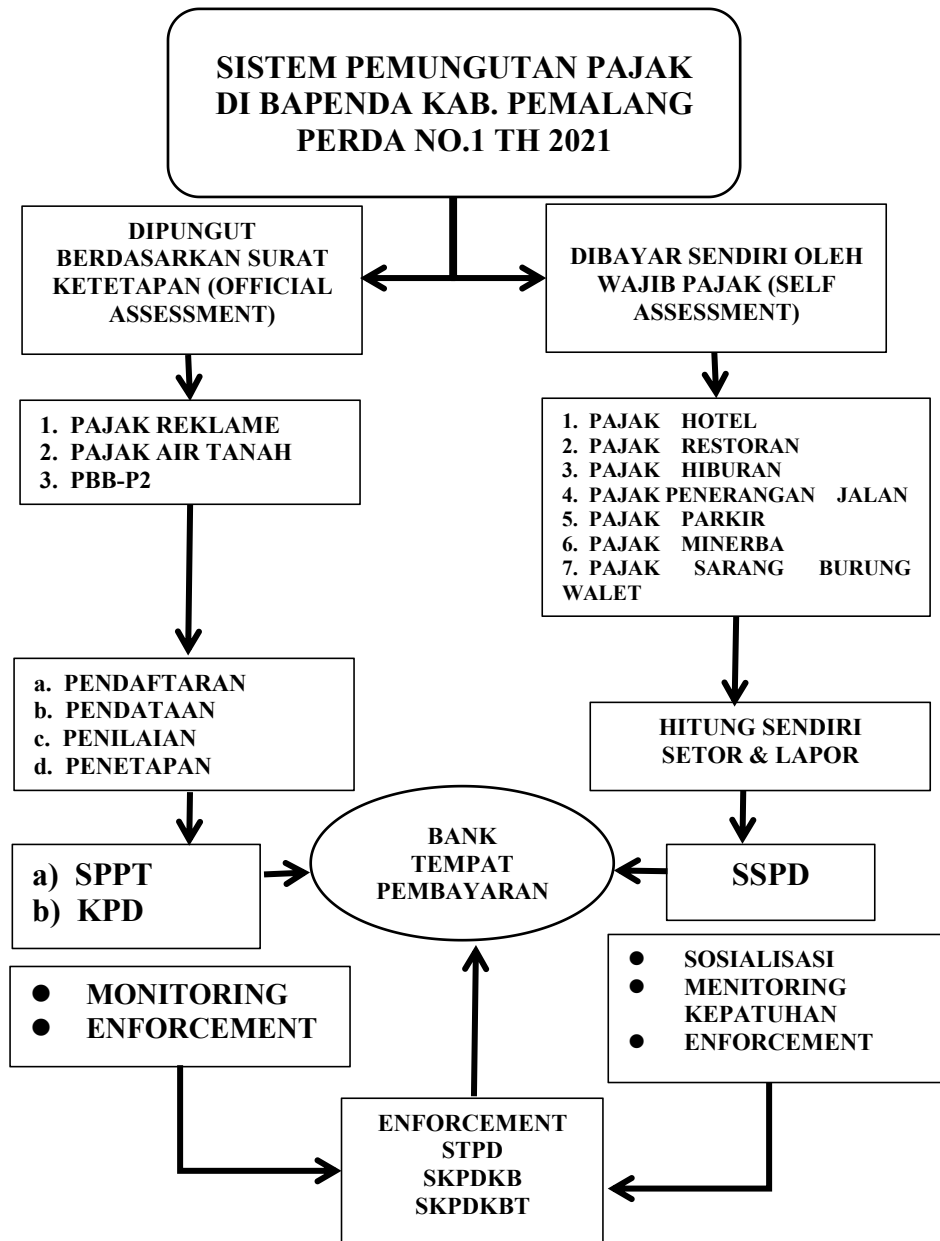
Jenis pelayanan yang terdapat di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Pelayanan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2. Pelayanan Permohonan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak
3. Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah

4. Pelayanan Pembayaran Tunggal Pajak Daerah

5. Pelayanan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

G. Sistem Pemungutan Pajak di Bapenda



Gambar 2.2
Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sumber: BAPENDA Kab. Pemalang

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pajak

a. Definisi dan Unsur Pajak

Pajak diartikan sebagai pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah, yang dikutip berdasarkan syarat yang sudah dikukuhkan (peraturan) tanpa mendapat manfaat khusus, supaya dapat melaksanakan tujuan sosial serta tujuan ekonomi suatu negara (Hasibuan, 2021).

S. I. Djajadiningrat mendefinisikan pajak sebagai sesuatu keharusan untuk memberikan sebagian harta ke kas negara yang diakibatkan oleh satu kondisi, peristiwa, serta perilaku yang memberi pangkat tetap, bukan merupakan vonis dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang disahkan pemerintah, tetapi tanpa ada balas jasa timbal baik secara langsung dari negara untuk mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara umum (Resmi, 2014:1).

Dari penjelasan tersebut bisa ditarik kesimpulan jika, ciri-ciri yang erat kaitannya dengan deskripsi pajak yakni:

- 1) Pungutan berupa uang oleh negara kepada rakyat. Pihak yang memiliki wewenang memungut pajak hanyalah negara.

- 2) Seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi kriteria dan ketentuan pajak diwajibkan atau dipaksa untuk membayar pajak kepada Pemerintah.
- 3) Diatur Pemerintah melalui Undang-Undang. Uang pajak ditarik dari masyarakat dengan kekuatan Undang-Undang serta Peraturan pendukung lainnya.
- 4) Kontraprestasi atau jasa timbal tidak diberikan secara langsung dari negara.
- 5) Diperuntukan bagi pendanaan negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang berfaedah untuk kemakmuran warga negara yang bersangkutan.

b. Landasan Hukum Pajak

Landasan hukum pajak di Indonesia yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perubahan ke Empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983.

c. Fungsi Pajak

Dua fungsi yang dimiliki pajak menurut Siti Resmi pada buku karyanya “Perpajakan Teori dan Kasus” Edisi 8 yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi *Budgetair* yang dimiliki pajak memiliki arti pajak selaku sumber pemasukan pemerintah guna pendanaan segala pengeluaran, yakni pengeluaran konvensional dan pengeluaran

pembangunan. Sebagai sumber finansial, pemerintah mengupayakan pemasukan sebesar-besarnya uang untuk kas negara dengan menyempurnakan berbagai peraturan perpajakan, upaya yang diambil yaitu dengan ekstensifikasi (Memperluas) dan Intensifikasi (Meningkatkan) pemungutan pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) (Resmi, 2014:3).

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *Reglerend* atau mengatur artinya pajak dapat digunakan sebagai instrumen pengatur dan pelaksana pengembangan strategi pemerintah pada bidang social dan ekonomi serta dapat dijadikan instrumen penunjang tercapainya target lain di luar bidang finansial (Resmi, 2014:3).

Contoh fungsi regulerend yang dimiliki pajak:

- a) Agar tercipta pemerataan pendapatan pemerintah memberlakukan tarif pajak *progresif* untuk pajak penghasilan supaya pihak yang memiliki gaji yang tinggi berkontribusi (membayar pajak) dengan jumlah yang tinggi.
- b) Mendorong para pengusaha untuk melakukan ekspor ke pasar dunia dengan pengenaan tarif pajak ekspor 0%, sehingga mampu memperbanyak jumlah devisa negara.
- c) Menarik minat investor asing untuk menginvestasikan modal di Indonesia dengan memberlakukan *tax holiday*

d. Sistem Pemungutan Pajak

Didefinisikan sebagai sistem atau metode pengumpulan uang pajak yang terutang supaya masuk ke kas negara.

(Waluyo, 2008:17) menjabarkan 3 jenis sistem pemungutan pajak yakni:

1) *Self Assessment System*

Sistem *self assessment* memberi tanggung jawab, kepercayaan, dan kekuasaan sepenuhnya pada wajib pajak agar menyimpulkan sendiri banyaknya besaran pajak yang menjadi tanggungan atau yang semestinya dibayar. Ciri dari sistem *self assessment* yakni:

- a) Wajib Pajak memiliki kekuasaan dalam menyimpulkan sendiri besaran pajak yang ditanggungnya.
- b) Wajib Pajak bersifat aktif/intens dengan menjumlah, melapor, serta melunasi sendiri pajak yang menjadi kewajibannya.
- c) Fiskus hanya berperan sebagai pengawas dan tidak ikut campur.

Contoh pajak yang menganut *system self assessment* yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh).

Menurut *self assessment* pemerintah tidak harus mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, kecuali jika terdapat

keterlambatan dalam pembayaran pajak yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.

Di satu sisi sistem ini mempermudah Wajib Pajak, namun sistem ini tentunya memiliki konsekuensi karena setiap detail kegiatannya dilakukan oleh Wajib Pajak secara mandiri. Bisa saja hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan.

2) *Official Assessment System*

Pada Sistem *Official Assessment* wajib pajak bersifat tidak aktif atau menerima, karena sistem pemungutan pajaknya memberikan kekuasaan kepada aparat pemungut pajak atau fiskus dalam memutuskan besaran pajak yang ditanggung oleh Wajib pajak. Pajak terutang akan diketahui setelah fiskus mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak.

Pada sistem ini, aparat pemungut pajak atau fiskus memegang prakarsa sepenuhnya dalam menghitung dan memungut pajak. Sistem ini diberlakukan bagi penduduk yang dirasa belum sanggup diberi tanggung jawab dalam menghitung dan menerapkan pajak. Meskipun fiskus sangat dominan dalam hal ini setelah reformasi pajak tahun 1984, sistem ini tidak berlaku lagi (Waluyo, 2008:17).

3) *Withholding System*

Withholding system memberikan kekuasaan pada pihak lain yang tidak terkait (bukan merupakan fiskus serta bukan wajib pajak yang terkait) guna menjalankan pemotongan atau pemungutan pajak yang merupakan tanggungan wajib pajak. Pelunasan pajak dengan memakai sistem *withholding*, akan diberikan Bupot atau Bukti Potong sebagai bukti pungutan pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) juga dapat digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Wajib pajak dapat melampirkan bukti potong tersebut bersama Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPH dan SPT masa PPN (Waluyo, 2008:17).

e. Tarif Pajak

(Mardiasmo, 2018:11-12) menjabarkan empat ragam tarif pajak yaitu:

1) Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang konsisten tidak terpengaruh dengan tinggi rendahnya nilai yang menjadi pengenaan pajak, sehingga banyaknya pajak yang ditanggung proposional terhadap besarnya angka kena pajak. Contoh Pajak yang memakai Tarif Sebanding/Proporsional adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang persentase tarifnya tetap 10% (sepuluh persen) meskipun terdapat kenaikan pada dasar pengenaan pajaknya.

2) Tarif Tetap

Tarif berupa nilai nominal yang konsisten pada sebanyak apapun nilai yang dikenai pajak atau jumlah yang dijadikan dasar dalam pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang ditanggung konsisten nilainya. Contoh Pajak yang memakai tarif tetap adalah Bea Materai tarifnya tetap Rp3000 dan Rp6000, namun mulai 2021 sudah diberlakukan materai elektronik dan Bea Materai terbaru naik menjadi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3) Tarif Progresif

Persentase tarif yang dipakai akan bertambah tinggi apabila nilai yang dikenakan pajak nilainya semakin besar. Tarif Pajak Progresif diimplementasikan pada pemungutan Pajak Penghasilan atas wajib pajak orang pribadi, sesuai yang dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tarif Pajak Penghasilan

NO	Jumlah PKP	Tarif
1	Rp0 - Rp50.000.000	5%
2	Rp50.000.000 - Rp250.000.000	15%
3	Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
4	>Rp500.000.000	30%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

4) Tarif *Degresif*

Tarif *Degresif* yaitu penggunaan tarif pajak dimana persentase tarif akan lebih kecil jika nilai yang dikenai pajak atau dasar pengenaan pajaknya (DPP) jumlahnya semakin besar.

f. Jenis Pajak

Di Indonesia Pajak digolongkan dalam berbagai jenis diantaranya:

1) Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

Menurut sifatnya pajak digolongkan dalam 2 golongan yaitu:

a) *Indirect Tax* (Pajak Tidak Langsung)

Menggambarkan jenis pajak yang saat terutang pajaknya terjadi ketika wajib pajak mengerjakan peristiwa atau tindakan tertentu. Sehingga pemungutan *indirect tax* tidak bisa dilaksanakn secara teratur, tetapi hanya bisa dikutip apabila terjadi kasus atau kejadian yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contoh *indirect tax* adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) disebut pajak tidak langsung karena hanya dapat dipungut jika seorang wajib pajak melakukan penjualan atas barang mewah.

b) *Direct tax* (Langsung)

Didefinisikan sebagai pajak yang dipungut rutin terhadap wajib pajak berasaskan pada surat ketetapan pajak

yang disusun kantor pajak, pada surat ketetapan pajak tercantum nominal pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak. *Direct tax* tidak dapat diwakilkan patut ditanggung seseorang yang memiliki kewajiban dan wajib ditanggung sendiri oleh wajib pajak terkait. Contoh pajak langsung yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam arti ekonomis suatu pajak dikategorikan *Direct tax* jika wajib pajak memiliki 3 unsur dalam pemenuhan perpajakannya, yaitu memiliki Unsur-unsur yang meliputi:

- (1) Orang yang secara hukum resmi diharuskan dan wajib melunasi pajak (Penanggung Pajak).
- (2) Orang yang pada kondisi sebenarnya menanggung terlebih dahulu tanggungan pajak (Penanggung Pajak).
- (3) Orang yang sesuai Undang-Undang harus dibebankan pajak (Pemikul Pajak).

Namun, apabila unsur-unsur tersebut terbagi atau ditemukan pada lebih dari satu orang maka dikategorikan *Indirect Tax*.

2) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berasaskan instansi atau lembaga pemungutnya pajak dikategorikan menjadi 2 golongan, yaitu:

a) Pajak Pusat

Pajak pusat ialah suatu pungutan yang dikutip oleh pemerintah pusat yakni Direktorat Jendral Pajak (DJP). Contoh Pajak Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil Penerimaan Pajak Pusat ini nantinya akan dipergunakan untuk mensubsidi pengeluaran konvensional Pemerintah Pusat dan guna keperluan pembangunan yang semuanya dimuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

b) Pajak daerah

Pajak Daerah ialah pajak yang dikutip oleh pemerintah daerah yang pemungutannya dibatasi hanya untuk masyarakat daerah tersebut, baik yang dipungut Pemda Tingkat I atau Pemda Tingkat II. Contoh Pajak Daerah diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan P2 (Mardiasmo, 2018:7-8)

2. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam APBD yang paling besar pengaruhnya yaitu Pajak daerah. Pajak Daerah ialah jenis

pajak yang dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah sesuai pada Peraturan Daerah (Perda) yang hak pungutannya dilakukan Pemerintah Daerah, serta hasil penerimaannya diutamakan untuk mendanai belanja pemerintah daerah, pemeliharaan serta pengembangan daerah (Siahaan, 2010:10).

Pajak Daerah ialah pajak-pajak yang ketentuan penarikannya diatur Peraturan Daerah (Perda) serta seluruh wajib pajak tiada diberi balas jasa secara langsung yang seimbang dari pemerintah daerah (Anggoro, 2017:18).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, pajak daerah ialah jenis pajak yang dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), yang kekuasaan pengutipannya dijalankan oleh pemerintah daerah serta hasilnya dimanfaatkan guna mendanai pengeluaran pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan di daerah dan menyelenggarakan pemerintahan yang seluruhnya dimuat oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

b. Asas Hukum Pajak Daerah

Landasan hukum pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri yang dimiliki Pajak Daerah yang membedakan dengan pajak pusat:

- 1) Asal Pajak daerah dapat berupa pajak asli daerah atau pajak pusat yang melalui otonomi daerah diberikan ke daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak daerah hanya dikutip di wilayah kerja atau administrasi yang dikuasai. Misalnya Pajak Daerah Kabupaten Pemalang artinya pajak tersebut hanya dipungut di kawasan Kabupaten Pemalang
- 3) Kemaslahatan pajak daerah yaitu guna mendanai urusan/pengeluaran untuk pembangunan serta urusan pemerintah daerah.
- 4) Landasan pemungutannya adalah Peraturan Daerah serta Undang-undang, sehingga pajaknya bersifat memaksa subjek pajak.

d. Jenis-jenis Pajak Daerah

Tabel 3.2
Pembagian Pajak Daerah

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Hotel
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Hiburan
Pajak Rokok	Pajak Restoran
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Reklame
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Pajak Parkir

	Pajak Air Tanah
	Pajak Sarang Burung Walet
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
	Pajak Penerangan Jalan
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber : Buku Perpajakan Indonesia

Tabel 3.2 diatas menjelaskan pembagian pajak daerah sejalan dengan ketentuan yang berlaku, Dalam menjalankan otonomi daerah dalam sektor perpajakan Pemda Tingkat I dan Tingkat II memiliki bagian masing-masing.

e. Pembagian Hasil atas Pemungutan Pajak Daerah Tetap

(Rahayu, 2010:47) Pembagian hasil atas pemungutan pajak daerah tetap diterapkan oleh pemerintah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, pembagiannya antara lain:

1) Hasil Perolehan pajak Provinsi sebagian diperuntukan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan serta syarat:

a) Paling sedikit 30% dari Hasil perolehan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan.

- b) Paling sedikit 70% dari Hasil pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta hasil Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Daerah kabupaten/Kota.
- 2) Paling Sedikit 10% dari Hasil perolehan Pajak Kabupaten diberikan kepada Desa di Wilayah daerah Kabupaten yang terkait.
- 3) Dengan memperhatikan aspek potensi juga aspek pemerataan antara Daerah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan lebih lanjut bagian Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Dalam Peraturan Daerah Kabupaten ditetapkan bagian desa dengan memperhatikan aspek potensi serta pemerataan antar Desa.
3. Pajak Restoran
- a. Definisi Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pungutan daerah atas jasa penjualan makanan dan minuman yang dinikmati konsumen langsung di restoran atau dilain tempat. Restoran merupakan layanan jasa penyaji makanan dan minuman yang memungut biaya, mencakup juga kantin, kafetaria, rumah makan, bar, dan warung termasuk catering atau jasa boga.

Pengambilan iuran Pajak Restoran di Indonesia di awalnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah

Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, kemudian Undang-Undang tersebut mengalami Perubahan perubahan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas restoran dan pajak hotel disatukan dengan menjadi Pajak Hotel dan Restoran. Tetapi berdasarkan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 kedua pajak tersebut dipisah dalam dua kategori pajak yang berbeda dan berdiri sendiri.

Tidak semua daerah Kabupaten atau Kota di Wilayah Indonesia memungut pajak restoran, itu berkenaan pada kekuasaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/kota untuk memutuskan pemungutan jenis pajak daerah. Guna melakukan pengutipan Pajak Restoran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal Pajak Restoran yang dipakai sebagai dasar hukum operasional dalam perwujudan pemungutan serta pengenaan pajak restoran.

b. Landasan Hukum Pajak Restoran

Landasan hukum pajak restoran di Kabupaten Pematang ialah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang

Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 28 September 2018.

- 3) Peraturan Bupati Pematang Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Pematang.

c. Objek dan Subjek Pajak Restoran

Segala bentuk pelayanan atau jasa yang tersedia di restoran, seperti penjualan makanan dan/atau minuman yang disantap oleh konsumen, baik disantap di tempat pelayanan maupun di lain tempat, dikategorikan sebagai objek pajak restoran. Pemerintah Kabupaten Pematang memberikan pengecualian bagi objek pajak restoran ialah setiap layanan/jasa yang disajikan oleh restoran yang angka penerimaannya dibawah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan tidak dikenakan pajak restoran atau dikecualikan. Subjek Pajak Restoran ialah badan atau orang pribadi yang melakukan pembelian makanan dan/atau minuman dari restoran.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Dasar Pemungutan Pajak Restoran (DPP) ialah total biaya yang seharusnya diterima atau dapat diterima oleh restoran. Tarif pajak restoran diputuskan senilai 10% (sepuluh persen). Pembayaran mengacu pada harga jual yang wajib dibayar oleh pengunjung kepada wajib pajak (pihak restoran), termasuk jumlah keseluruhan yang diserahkan dan pengembalian yang diminta oleh wajib pajak untuk ditukar dengan makanan dan / atau minuman.

Contoh Pembayaran, Mr. Q menikmati hidangan yang disajikan oleh Restoran “Ayam Geprek Sa’I” dan melakukan pembayaran atas:

Makanan	Rp400.000,00
Minuman	<u>Rp150.000,00 +</u>
Total	Rp550.000,00
Biaya Pelayanan 10%	<u>Rp55.000,00 +</u>
Total Pembayaran	Rp605.000,00

Jumlah pembayaran yang dimaksud yaitu pembayaran sebelum dikenai Pajak Restoran, yaitu sebanyak Rp605.000,00.

Besaran pokok Pajak Restoran yang menjadi tanggungan metode perhitungannya dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pada umumnya perhitungan pajak restoran menggunakan rumus berikut:

$$\text{Pajak Restoran Terutang} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Berdasarkan rumus diatas diketahui 10% merupakan tarif dari pajak restoran. Jadi dari perhitungan penunaian yang dilaksanakan subjek pajak kepada Restoran “Ayam Geprek Sa’I” diatas, karena besaran tarif pajak di Kabupaten Pematang Jaya senilai 10% dapat dihitung besarnya pajak restoran yang jadi tanggungan, yakni sejumlah:

$$10\% \times \text{Rp } 605.000 = \text{Rp } 60.500,00.$$

e. Masa Pajak dan Saat Terhutangnya Pajak Restoran

Jangka waktu pajak restoran adalah 1 (satu) bulan kalender. Pajak restoran terhutang pada saat dilakukan pembayaran oleh subjek pajak kepada wajib pajak restoran.

Pihak restoran yang sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak restoran harus dilengkapi dengan nota pesanan (*bill*) atau bon penjualan dalam memungut pajak restoran kepada para konsumen, kecuali Bupati/Walikota setempat sudah menetapkan peraturan yang memperbolehkan pihak restoran tidak memakai nota pesanan. Nota pesanan harus diserahkan langsung pada subjek pajak saat wajib pajak melakukan pembayaran, nota pesanan tersebut digunakan sebagai bukti pemungutan pajak. Dalam ketentuan yang berlaku nota pesanan minimal harus mencantumkan catatan tentang penyerahan pesanan makanan, minuman, dan termasuk tambahannya.

f. Syarat Restoran Kena Pajak

Tidak semua tempat makan di Kabupaten Pemalang memungut pajak restoran kepada para pengunjung yang singgah. Berikut ini syarat restoran kena pajak:

- 1) Memiliki izin usaha/sertifikat usaha TDUP(Tanda Daftar Usaha Pariwisata) yang diterbitkan melalui OSS dan atau memiliki surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)

- 3) Memiliki bangunan tetap sebagai tempat usaha (bukan berupa tenda atau stand dagang)
- 4) Memiliki Omzet Perbulan > Rp2.000.000 per bulan
- 5) Sudah Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Restoran
- 6) Memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)
- 7) Selalu menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (bill) dalam setiap pelayanan yang disediakan

Berikut ini persyaratan yang harus dilengkapi untuk membuat TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata):

- 1) Formulir Perizinan dan Surat Pernyataan (dengan materai Rp10,000)
- 2) KTP Pemilik dan Penanggung Jawab
- 3) NPWP Pemilik dan Penanggung Jawab
- 4) NPWP Perusahaan
- 5) Akta Pendirian Perusahaan (PT, CV, Firma, atau Perorangan)
- 6) KTP dan Surat Kuasa Pengurus (apabila dikuasakan)
- 7) Izin Gangguan (HO)
- 8) Sertifikat Laik Sehat (SLS)
- 9) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
- 10) Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)
- 11) Bukti Kepemilikan Tanah atau Bangunan (lampiran bukti)
- 12) Proposal Teknis (Denah Lokasi, Rencana, dan Foto)

13) Memastikan Dosmisili Usaha Restoran.

g. Prosedure Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran

1) Prosedure Pemungutan Pajak Restoran

Pengutipan pajak restoran tidak boleh diserahkan pada pihak ketiga atau diborongkan. Artinya wajib pajak diharuskan menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri melalui SKPD. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dari jumlah omzet yang diperoleh pihak restoran.

2) Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran

Penunaian pajak dapat dilakukan setiap hari kerja di Bank Jateng paling lambat tanggal 15 bulan setelahnya dan harus lunas sekaligus. Jika terjadi keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 2% perbulan dengan maksimal denda 15 bulan.

4. E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

a. Definisi SPTPD dan E-SPTPD

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah disingkat SPTPD digunakan untuk menyampaikan perhitungan pajak daerah, membayar pajak, menentukan objek pajak atau bukan objek pajak, serta menyampaikan harta serta kewajiban berlandaskan keputusan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik atau diringkas E-SPTPD ialah sistem aplikasi berbasis *webssite* yang dipergunakan untuk menyampaikan kewajiban pajak daerah secara *online* serta mudah di

akses dimana saja. Sistem ini terhubung langsung dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Website dari E-SPTPD dapat diakses melalui berbagai browser yang tersedia di smartphone atau perangkat komputer Wajib Pajak seperti *Google Chrome*, *Firefox*, *Internet Explore*, dan lain sebagainya.

b. Menu- Menu Pada *Website E-SPTPD*

Dalam *website* E-SPTPD terdapat banyak menu dan submenu dengan beragam kegunaan menu tersebut antara lain:

1) Dashboard E-SPTPD

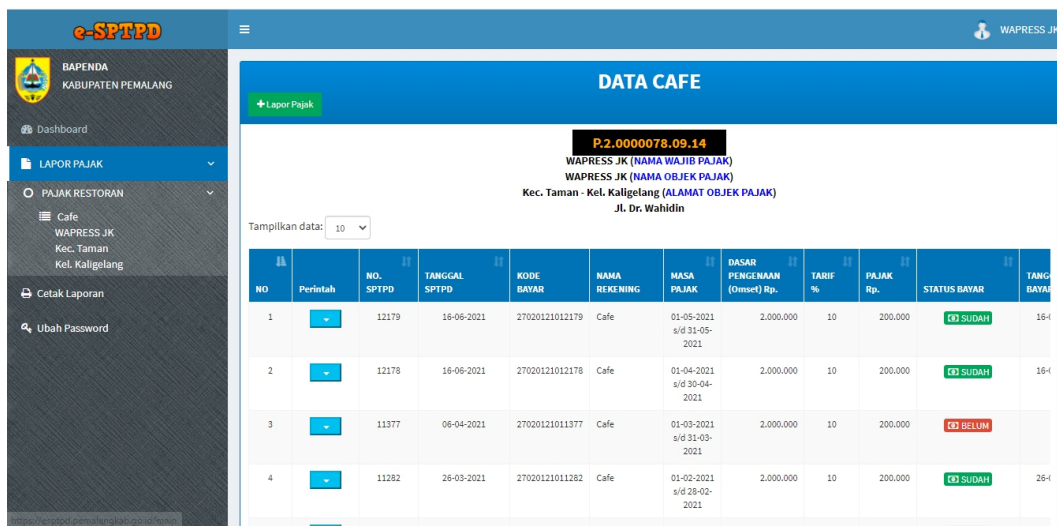
Merupakan halaman awal yang muncul pada saat wajib pajak berhasil melakukan *login* E-SPTPD.



Gambar 3.1
Dashboard E-SPTPD

2) Menu Lapor Pajak

Dalam Menu Lapor Pajak terdapat sub menu seperti jenis pajak yang terdaftar menggunakan NPWPD wajib pajak, dan klasifikasi jenis usaha yang menjadi objek pajak. Dalam menu lapor pajak juga terdapat data mengenai histori pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan wajib pajak. Terdapat Sub Menu Lapor Pajak untuk melakukan pengisian *form* pelaporan pajak.



DATA CAFE

P.2.0000078.09.14
WAPRESS JK (NAMA WAJIB PAJAK)
WAPRESS JK (NAMA OBJEK PAJAK)
 Kec. Taman - Kel. Kaligelang (ALAMAT OBJEK PAJAK)
 Jl. Dr. Wahidin

Tampilkan data: 10

NO	Perintah	NO. SPTPD	TANGGAL SPTPD	KODE BAYAR	NAMA REKENING	MASA PAJAK	DASAR PENGENAAN (Omset) Rp.	TARIF %	PAJAK Rp.	STATUS BAYAR	TANG. BAYAR
1		12179	16-06-2021	27020121012179	Cafe	01-05-2021 s/d 31-05-2021	2.000.000	10	200.000	SUDAH	16-06-2021
2		12178	16-06-2021	27020121012178	Cafe	01-04-2021 s/d 30-04-2021	2.000.000	10	200.000	SUDAH	16-06-2021
3		11377	06-04-2021	27020121011377	Cafe	01-03-2021 s/d 31-03-2021	2.000.000	10	200.000	BELUM	
4		11282	26-03-2021	27020121011282	Cafe	01-02-2021 s/d 28-02-2021	2.000.000	10	200.000	SUDAH	26-03-2021

Gambar 3.2
Halaman Menu Lapor Pajak

3) Menu Cetak laporan

Menu ini diperuntukan untuk melakukan cetak kartu data

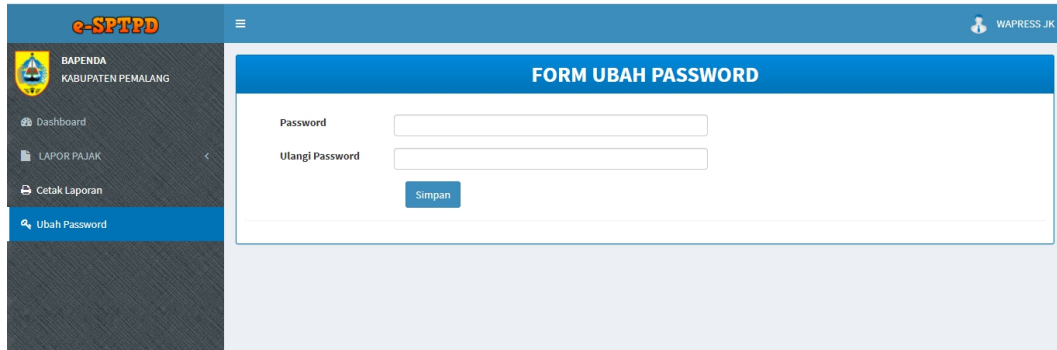


The screenshot displays the 'e-SPTPD' web application interface for BAPENDA KABUPATEN PEMALANG. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, LAPOR PAJAK, Cetak Laporan (highlighted), and Ubah Password. The main content area is titled 'CETAK KARTU DATA' and includes a form with the following fields: 'Periode' (set to 2021), 'Jenis Pajak' (dropdown menu with 'Silahkan Pilih'), and 'Tanggal Cetak' (set to 26-07-2021). A red 'CETAK PDF' button is located on the right side of the form.

Gambar 3.3
Halaman Cetak Laporan

4) Menu Ubah Password

Untuk melakukan penggantian password.



The screenshot displays the 'e-SPTPD' web application interface for BAPENDA KABUPATEN PEMALANG. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, LAPOR PAJAK, Cetak Laporan, and Ubah Password (highlighted). The main content area is titled 'FORM UBAH PASSWORD' and includes a form with the following fields: 'Password' and 'Ulangi Password' (both text input fields). A blue 'Simpan' button is located below the input fields.

Gambar 3.4
Halaman Ubah Password

B. Praktek

1. Implementasi E-SPTPD di Bapenda Kabupaten Pemalang

Menurut Merilee S. G. dimuat dalam (Wahyuningsih et al., 2014) penerapan kebijakan publik kesuksesannya ditunjukkan dengan tingkat *implementability* kebijakan tersebut. *Implementability* mencakup isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan (*context of policy*). Isi kebijakan meliputi manfaat dari kebijakan tersebut, tingkat perubahan yang ingin di capai, lingkungan kebijakan meliputi tingkat kepatuhan masyarakat dan karakteristik pemimpin yang berkuasa.

Pada bulan November 2018 Bapenda Kabupaten Pemalang menggunakan Sistem Elektronik/Online dalam proses pelaporan pajak daerah. Sambungan Elektronik/Online ini merupakan sambungan langsung antara sekumpulan subsistem yang terintegrasi atau kondisi suatu perangkat yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet, sub sistem yang dimaksud ialah E-SPTPD. Pada Tahun 2020 Kabupaten Pemalang memiliki kurang lebih 105 (Seratus Lima) Wajib Pajak Restoran dengan Target Penerimaan Pendapatan sebesar Rp1.025.000.000,00 (Satu Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan Realisasi penerimaannya sebesar Rp. 1.138.628.930,00 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang artinya Presentase Perolehan penerimaan pendapatannya lebih dari 100%.

Tabel 3.3
Sasaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran
Bapenda Kabupaten Pemalang

Tahun	Satuan	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
2018	Rp.	650.000.000	1.144.147.989	176,02
2019	Rp.	850.000.000	1.404.726.051	165,26
2020	Rp.	1.025.000.000	1.138.628.930	111,09

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

a. Uji Efektifitas

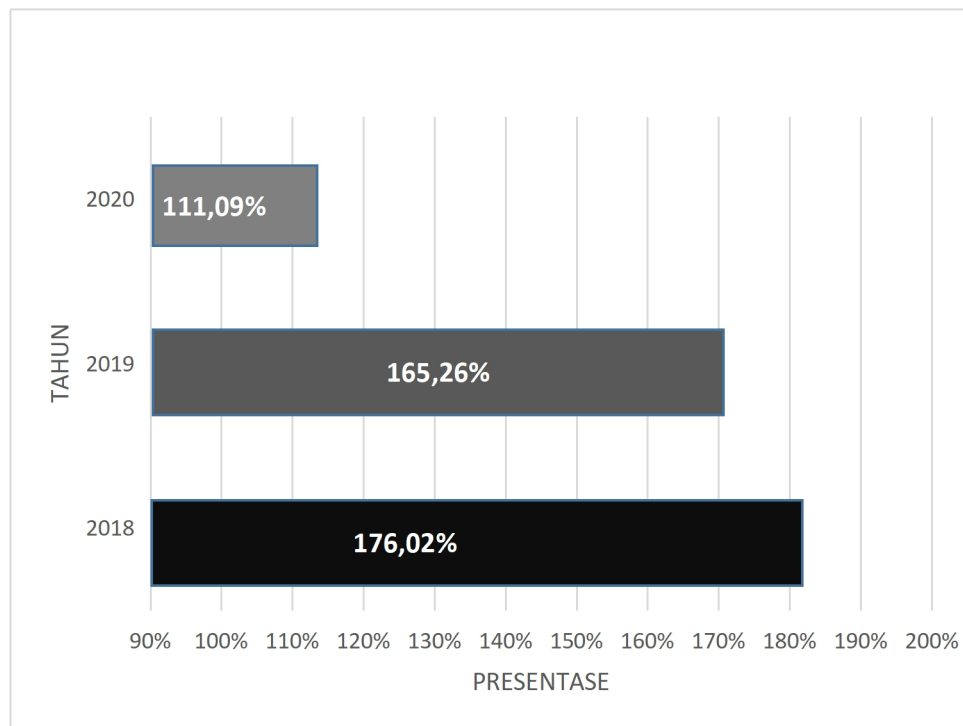
Perhitungan tingkat efektifitas Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran Kabupaten Pemalang dihitung menggunakan cara berikut:

$$\text{Efektifitas} = \text{Realisasi} : \text{Target} \times 100\%$$

Dari Tabel 3.3 kesimpulan yang dapat diambil ialah Realisasi penerimaan Pajak Restoran setiap tahunnya selalu melebihi target penerimaan, ini menandakan bahwa penerapan sistem online dalam pelaporan SPTPD Pajak Restoran sudah efektif. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran selalu melampaui 100% dari yang ditargetkan, efektifitas tertinggi sejak penerapannya dicapai pada tahun 2018 dengan angka 176,02% dan rata-rata efektifitas sejak diberlakukannya sistem *online* ini adalah sebesar 150,79%. Dalam tabel 3.3 terlihat bahwa setiap tahun tingkat efektifitas selalu mengalami penurunan, ini terjadi karena setiap

tahun sasaran dan capaian penerimaan pajak restoran selalu mengalami peningkatan.

b. Grafik Efektifitas



Gambar 3.5
Grafik Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran

Tabel 3.4
Penerimaan Pajak Restoran Masa 2020

No	Masa Pajak 2020	Jumlah Penerimaan
1	Januari	Rp131.696.187
2	Februari	Rp137.009.578
3	Maret	Rp67.669.474
4	April	Rp58.944.494
5	Mei	Rp66.397.444

6	Juni	Rp139.706.840
7	Juli	Rp69.202.490
8	Agustus	Rp93.206.113
9	September	Rp102.451.271
10	Oktober	Rp92.800.837
11	November	Rp131.136.349
12	Desember	Rp81.918.337
JUMLAH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN		Rp1.172.139.414

Sumber: E-Simpatda Kab.Pemalang

Data pada Tabel 3.4 diatas merupakan data dari penerimaan pajak restoran dari pungutan pajak yang terutang oleh wajib pajak dan denda atas keterlambatan pembayaran pajak restoran.

2. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Baru Pajak Restoran

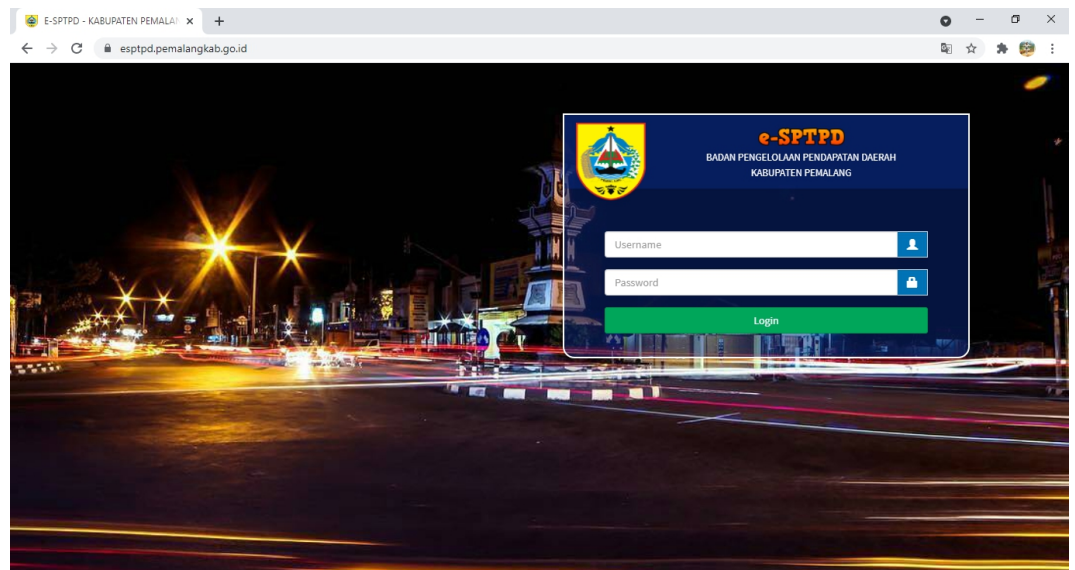
- a. Setiap Wajib Pajak restoran diwajibkan mendaftarkan usaha yang menjadi objek pajak daerah untuk mendapatkan NPWPD
- b. Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak.
- c. Pendaftaran dilaksanakan paling lambat akhir bulan kalender dimulainya usaha yang menjadi objek pajak.
- d. Surat pendaftaran yang telah diisi disampaikan kepada Bapenda dilampiri Fotocopi/scan.foto Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Tanda Identitas Sementara (KITAS) atau Paspor.

- e. Kepala Bapenda melakukan penelitian atas Surat Pendaftaran Objek Pajak dan menerbitkan NPWPD serta memberikan *Username* dan *Password*. Penelitian dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja untuk menerima atau menolak pendaftaran.
- f. Jika diketahui wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan objek pajak, Kepala Bapenda secara jabatan mencetuskan NPWPD menurut data yang dimiliki alias yang didapatkan sendiri oleh Bapenda.
- g. Wajib Pajak Restoran Sudah dapat melaporkan Pajaknya melalui aplikasi E-SPTPD mulai 1 bulan setelah pendaftaran.

3. Tata Cara Pelaporan Melalui Aplikasi E-SPTPD

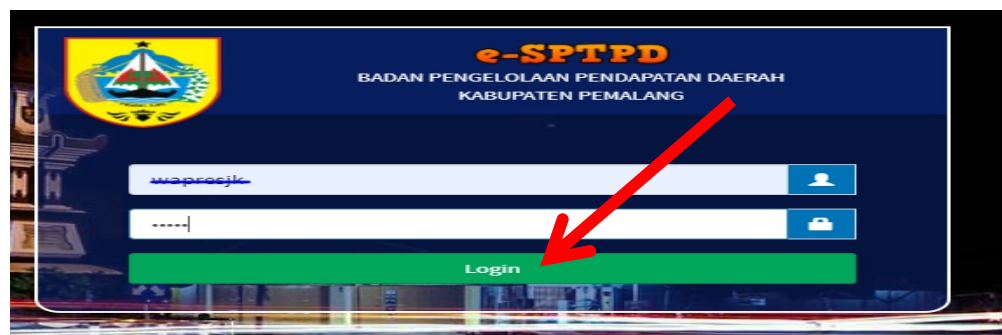
Wajib pajak diharuskan melaporkan laporan penyelenggaraan usaha yang menjadi objek pajak restoran setiap masa pajak yakni paling lambat tanggal 7 bulan kalender berikutnya. Pelaporan dilaksanakan dengan mengisi SPTPD dalam hal ini yaitu secara *online* melalui E-SPTPD, tata caranya sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Restoran yang telah melakukan pendaftaran ke Bapenda akan memperoleh Username dan Password untuk login pada website *esptpd.pemalangkab.go.id*
- b. Buka lama ESPTPD melalui google, kemudia akan muncul tampilan sebagai berikut



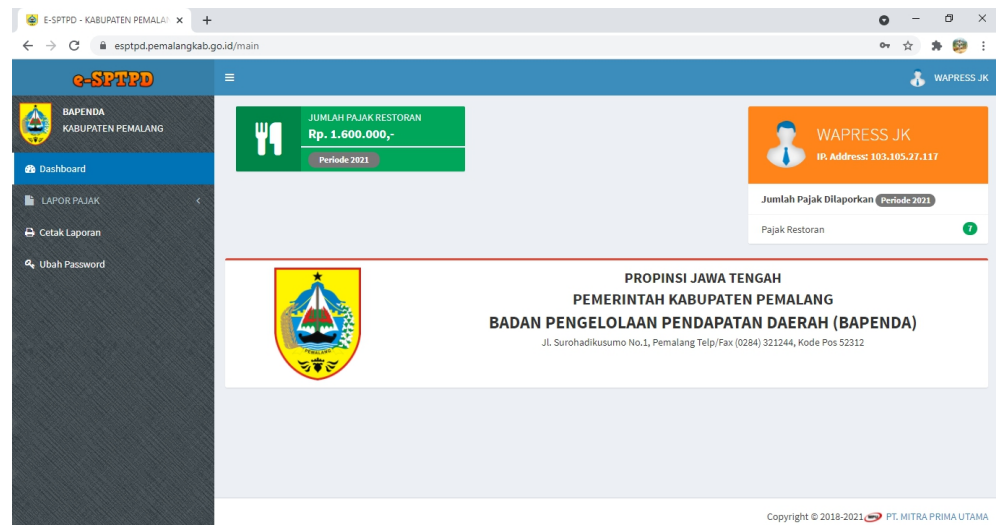
Gambar 3.6
Halaman E-SPTPD

- c. isi Username dan Password yang sudah diberikan oleh pihak BAPENDA Kab. Pemalang kemudian klik “Login”



Gambar 3.7
Kolom Login E-SPTPD

- d. Setelah berhasil melakukan *Login* tampilan layar akan berubah seperti gambar di bawah



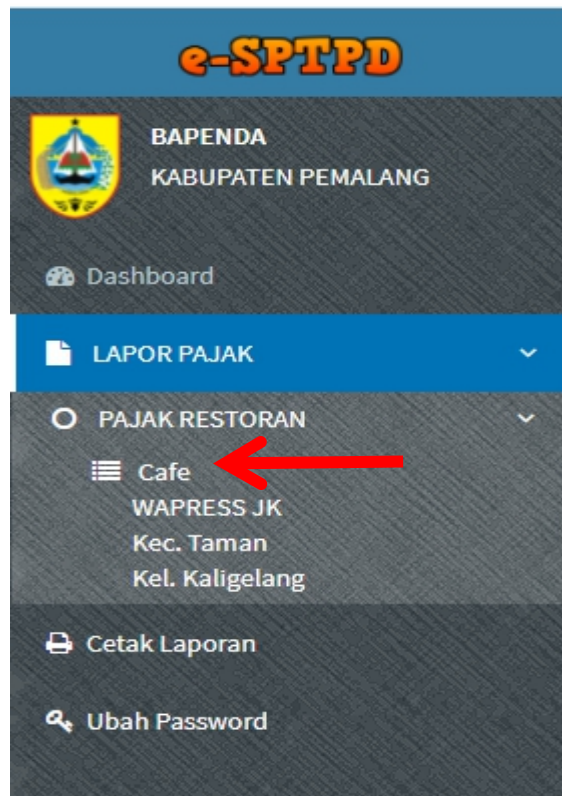
Gambar 3.8
Dasboard E-SPTPD

- e. Untuk melakukan Pelaporan E-SPTPD Klik pada menu “LAPOR PAJAK”



Gambar 3.9
Menu Lapor Pajak

- f. Setelahnya pilih menu “PAJAK RESTORAN” dan kemudian klik Pada Submenu yang menunjukkan klasifikasi usaha yang menjadi objek pajak restoran misalnya cafe, rumah makan, dll



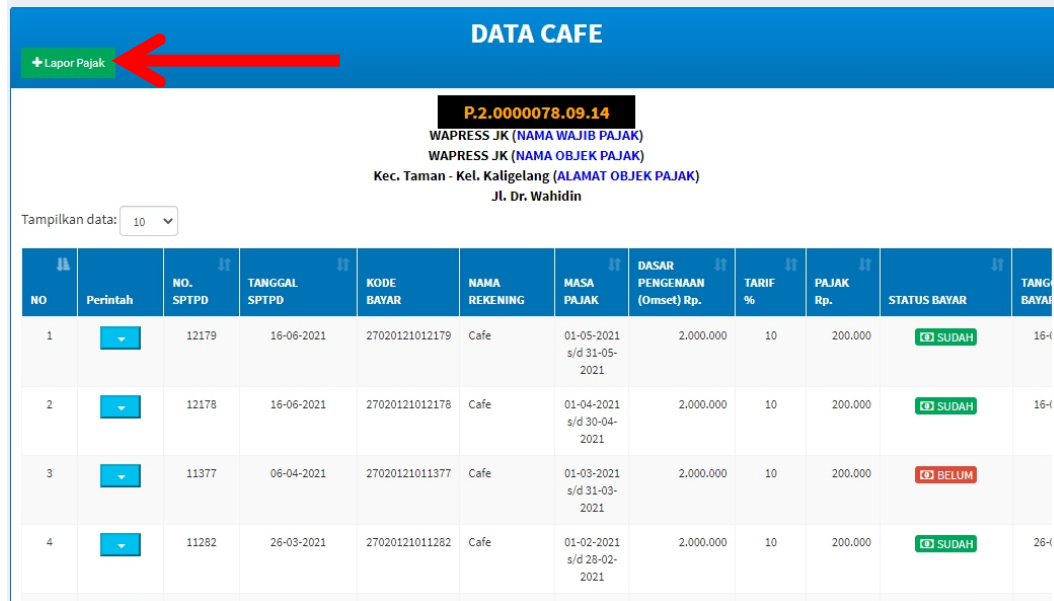
Gambar 3.10
Sub Menu Pajak Restoran

g. Selanjutnya akan muncul halaman Data Objek Pajak

NO	Perintah	NO. SPTPD	TANGGAL SPTPD	KODE BAYAR	NAMA REKENING	NAMA PAJAK	DASAR PENGEMASAN (Contoh) Rp.	TARIF %	PAJAK Rp.	STATUS BAYAR	TANGG BAYAR
1		12179	16-06-2021	27020121012179	Cafe	01-05-2021 s/d 31-05-2021	2.000.000	10	200.000	UD SUDAH	16-6
2		32178	16-06-2021	27020121012178	Cafe	01-04-2021 s/d 30-04-2021	2.000.000	10	200.000	UD SUDAH	16-4
3		11377	06-04-2021	27020121011377	Cafe	01-03-2021 s/d 31-03-2021	2.000.000	10	200.000	UD SELLING	
4		11282	28-03-2021	27020121011282	Cafe	01-02-2021 s/d 28-02-2021	2.000.000	10	200.000	UD SUDAH	28-4

Gambar 3.11
Laman Data Objek Pajak

h. Kemudian Klik menu “Lapor Pajak”



DATA CAFE

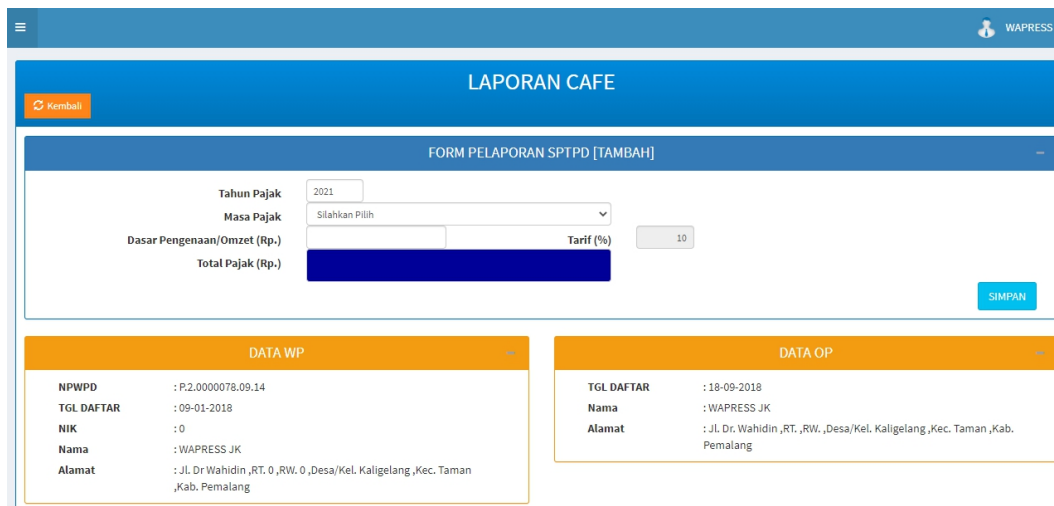
P.2.0000078.09.14
WAPRESS JK (NAMA WAJIB PAJAK)
WAPRESS JK (NAMA OBJEK PAJAK)
Kec. Taman - Kel. Kaligelang (ALAMAT OBJEK PAJAK)
Jl. Dr. Wahidin

Tampilkan data: 10

NO	Perintah	NO. SPTPD	TANGGAL SPTPD	KODE BAYAR	NAMA REKENING	MASA PAJAK	DASAR PENGENAAN (Omzet) Rp.	TARIF %	PAJAK Rp.	STATUS BAYAR	TANGGAL BAYAR
1		12179	16-06-2021	27020121012179	Cafe	01-05-2021 s/d 31-05-2021	2.000.000	10	200.000		16-06-2021
2		12178	16-06-2021	27020121012178	Cafe	01-04-2021 s/d 30-04-2021	2.000.000	10	200.000		16-06-2021
3		11377	06-04-2021	27020121011377	Cafe	01-03-2021 s/d 31-03-2021	2.000.000	10	200.000		
4		11282	26-03-2021	27020121011282	Cafe	01-02-2021 s/d 28-02-2021	2.000.000	10	200.000		26-03-2021

Gambar 3.12
Menu Lapor Pajak

i. Akan muncul halaman untuk Lapor Pajak Restoran, Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan dengan mengisi kolom Tahun Pajak, Masa Pajak, dan Dasar Pengenaan/Omzet. Untuk Kolom Tarif dan Total Pajak akan terisi secara otomatis.



LAPORAN CAFE

Kembali

FORM PELAPORAN SPTPD [TAMBAH]

Tahun Pajak: 2021
Masa Pajak: Silahkan Pilih
Dasar Pengenaan/Omzet (Rp.):
Tarif (%): 10
Total Pajak (Rp.):

DATA WP

NPWPD : P.2.0000078.09.14
TGL DAFTAR : 09-01-2018
NIK : 0
Nama : WAPRESS JK
Alamat : Jl. Dr. Wahidin ,RT. 0 ,RW. 0 ,Desa/Kel. Kaligelang ,Kec. Taman ,Kab. Pemalang

DATA OP

TGL DAFTAR : 18-09-2018
Nama : WAPRESS JK
Alamat : Jl. Dr. Wahidin ,RT. ,RW. ,Desa/Kel. Kaligelang ,Kec. Taman ,Kab. Pemalang

Gambar 3.13
Menu Untuk Melaporkan E-SPTPD

- j. Setelah mengisi form pelaporan, klik “Simpan” untuk menyimpan Pelaporan



The screenshot shows a web interface for reporting SPTPD. At the top is a blue header with 'LAPORAN CAFE' and a 'Kembali' button. Below is a form titled 'FORM PELAPORAN SPTPD [TAMBAH]'. The form contains the following fields and values:

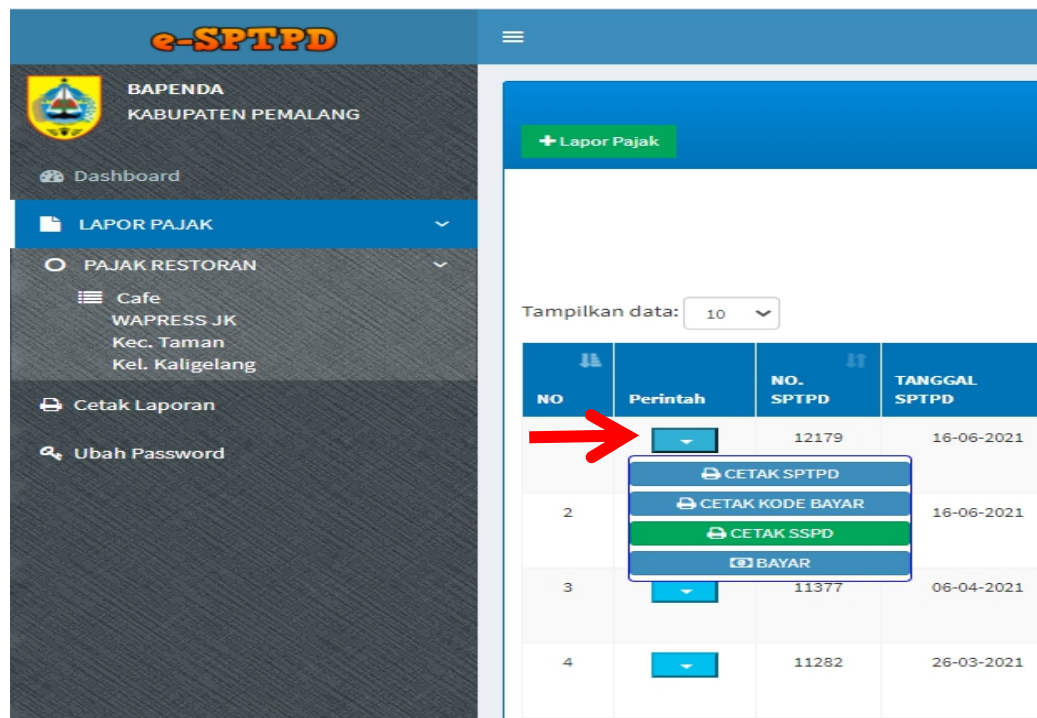
Tahun Pajak	Masa Pajak	Dasar Pengenaan/Omzet (Rp.)	Tarif (%)	Total Pajak (Rp.)
2021	Mei	2.000.000	10	200.000

A red arrow points to the 'SIMPAN' button located at the bottom right of the form.

Gambar 3.14
From Pelaporan SPTPD

Dengan demikian pelaporan SPTPD berhasil dilakukan, selanjutnya Wajib pajak dapat mencetak SPTPD dan melakukan pembayaran pajak restoran melalui bank BPD Jateng paling akhir tanggal 15 (lima belas) bulan selanjutnya. Jika dalam rentang waktu yang sudah diputuskan wajib pajak tidak membayarkan pajak yang ditanggungnya maka akan dikenai sanksi administrasi sebanyak 2% (dua persen) per bulan dalam masa pajak paling lama 15 (lima belas) bulan.

Untuk Melakukan Pencetakan SPTPD, Kode Bayar, dan SSPD wajib pajak dapat mengklik ikon pada kolom perintah, disana terdapat pilihan untuk cetak SSPD, SPTPD, dan Kode Bayar.



Gambar 3.15
Pilihan Menu untuk Cetak

4. Perhitungan Pajak Restoran

Contoh Kasus I

Misal dalam jangka waktu satu bulan Restoran Geprek Sa'I memiliki omzet Rp23.500.000,00 maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan pajak = Rp23.500.000

Tarif pajak = 10 %

Total pajak yang harus di setor pihak restoran pada Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} \text{DPP} \times \text{Tarif} &= \text{Rp}23.500.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp}2.350.000 \end{aligned}$$

Jika pihak restoran diketahui dalam belum melakukan pembayaran sampai kurun waktu yang ditetapkan maka pihak restoran akan menerima sanksi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajakn, artinya:

$$\begin{aligned} 2\% \times \text{DPP} &= 2\% \times \text{Rp}2.350.000 \\ &= \text{Rp}47.000 \end{aligned}$$

Jadi Jumlah keseluruhan pajak yang harus dibayar pihak restoran jika terlambat membayar pajak adalah:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah pajak yang ditanggung} + \text{Denda} &= \text{Rp}2.350.000 + \text{Rp}47.000 \\ &= \text{Rp}2.397.000,00 \end{aligned}$$

Contoh Kasus II

Diketahui Rocket Chicken Comal merupakan salah satu restoran yang berada di kawasan Kabupaten Pematang. Dalam 2 bulan masa pajak berturut-turut (September-November 2020) Rocket Chicken Comal tidak melakukan pembayaran pajak terutang dan baru melakukan pembayaran pada bulan akhir Desember 2020, jika diketahui besaran omzet yang di peroleh pihak Rocket chicken dalam 3 bulan tersebut adalah:

- Omzet Bulan September = Rp32.000.000,00
- Omzet Bulan November = Rp30.000.000,00
- Omzet Bulan Desember = Rp33.700.000,00

Maka Perhitungannya sebagai berikut:

● Perhitungan Bulan September:

Tarif Pajak = 10%

Omzet = Rp32.000.000,00

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{DPP} \times \text{Tarif} \\
 &= 32.000.000 \times 10\% \\
 &= \text{Rp}3.200.000,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Denda keterlambatan Pembayaran(2 bulan)} &= 4\% \times \text{Rp}3.200.000,00 \\
 &= \text{Rp}128.000,00
 \end{aligned}$$

Total Pajak yang harus dibayar untuk masa pajak September adalah sebesar

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak terutang} + \text{denda pajak} &= \text{Rp}3.200.000,00 + \text{Rp}128.000,00 \\
 &= \text{Rp}3.328.000,00
 \end{aligned}$$

- Perhitungan Bulan November

$$\begin{aligned}
 \text{Tarif Pajak} &= 10\% \\
 \text{Omzet} &= \text{Rp}30.000.000,00 \\
 \text{Pajak Terutang} &= \text{DPP} \times \text{Tarif} \\
 &= 30.000.000 \times 10\% \\
 &= \text{Rp}3.000.000,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Denda keterlambatan Pembayaran(2 bulan)} &= 2\% \times \text{Rp}3.000.000,00 \\
 &= \text{Rp}60.000,00
 \end{aligned}$$

Total Pajak yang harus dibayar untuk masa pajak September adalah sebesar

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak terutang} + \text{denda pajak} &= \text{Rp}3.000.000,00 + \text{Rp}60.000,00 \\
 &= \text{Rp}3.060.000,00
 \end{aligned}$$

- Perhitungan Bulan Desember

$$\begin{aligned}
 \text{Tarif} &= 10\% \\
 \text{Omzet} &= \text{Rp}33.700.000,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{DPP} \times \text{Tarif} \\
 &= 33.700.000 \times 10\% \\
 &= \text{Rp}3.370.000,00
 \end{aligned}$$

- Total Pajak Terutang yang harus ditanggung Rocket Chicken Comal adalah Sebesar:

$$\begin{aligned}
 \rightarrow \text{Jumlah pajak terutang bulan September} &+ \text{Jumlah Pajak terutang} \\
 &\text{bulan November} + \text{Jumlah Pajak terutang bulan Desember} = \\
 &= \text{Rp}3.328.000 + \text{Rp}3.060.000 + \text{Rp}3.370.000 \\
 &= \text{Rp}9.758.000,00
 \end{aligned}$$

5. Kendala dalam Implementasi E-SPTPD

Pelaksanaan Implementasi E-SPTPD memiliki beberapa kendala diantaranya:

- a. Banyak Wajib pajak Daerah Kabupaten Pemalang yang belum mengetahui bagaimana cara pelaporan SPTPD melalui Aplikasi E-SPTPD.
- b. Minimnya tingkat pemahaman Wajib Pajak Kabupaten Pemalang untuk membayar pajak terutang.
- c. Koneksi yang tidak Stabil terkadang memutus jaringan sehingga proses pelaporan E-SPTPD menjadi terhambat.
- d. Sistem E-SPTPD sering mengalami error sistem sehingga menghambat Wajib Pajak dalam melaporkan SPTPDnya.

6. Manfaat dari Penerapan E-SPTPD

Banyak masyarakat yang belum memahami proses pelaporan pajak daerah melalui program E-SPTPD tak dapat dipungkiri bahwa pengimplementasian program ini membawa manfaat bagi para Wajib Pajak diantaranya:

- a. Proses pelaporan SPTPD menjadi lebih mudah, lebih efektif dan efisien, karena Wajib Pajak tak perlu datang lagi ke kantor dan tidak perlu lagi mengantri untuk melaporkan SPTPDnya. Dan Wajib Pajak juga dapat menghemat waktu mereka karena program ini dapat mereka akses dimana saja kapan saja.
- b. Dalam masa pandemi seperti sekarang pengimplementasian program ini dapat meminimalisir kontak langsung/pertemuan antara Wajib Pajak dengan petugas atau dengan Wajib Pajak lain.
- c. Pelaporan SPTPD melalui sistem online juga bermanfaat untuk mengurangi penumpukan berkas fisik seperti kertas dokumen pajak. Dengan pelaporan melalui sistem online tentu akan mengurangi pemakaian kertas serta mengurangi resiko berkas yang hilang atau mengalami kerusakan saat disimpan.

7. Sanksi Pidana

Sanksi bagi Wajib Pajak restoran yang lalai membayar dan melaporkan pajak adalah:

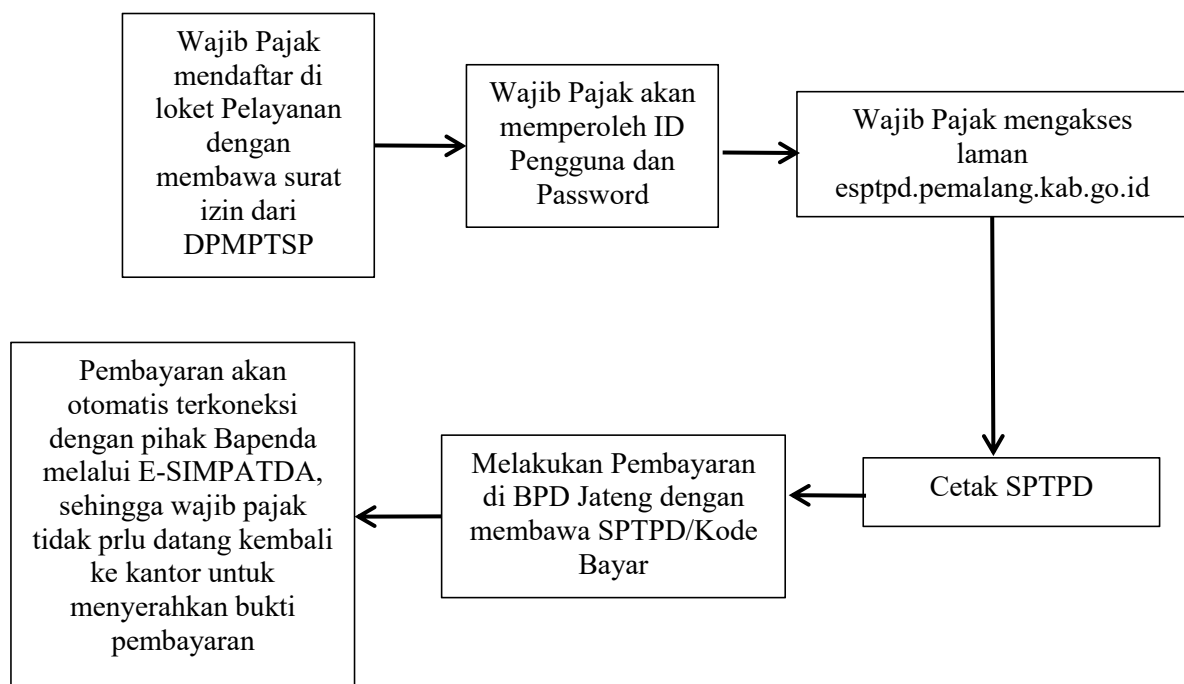
- a. Kurungan penjara 2 tahun paling lama dan denda maksimal 4 kali pajak yang menjadi tanggungannya bagi wajib pajak yang sengaja

- tidak melaporkan SPTPD dan dengan sengaja membuat kerugian bagi daerah.
- b. Kurungan penjara paling lama 1 tahun bagi wajib pajak yang lalai, memasukkan data dengan tidak benar, tidak lengkap dokumen SPTPD, mencantumkan keterangan palsu yang merugikan bagi daerah serta denda maksimal 2 kali besaran pajak yang menjadi tanggungannya.

8. Alur Pelayanan E-SPTPD

- a. Alur Pelayanan Wajib Pajak Baru
- 1) Wajib Pajak yang belum mendaftar Pajak Restoran dapat mendatangi BAPENDA, melakukan pendaftaran di Loker Pelayanan BAPENDA dengan membawa surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang dan membawa KTP.
 - 2) Wajib Pajak yang sudah terdaftar dapat melakukan Input SPTPD secara online. Untuk melakukan Input SPTPD secara online Wajib Pajak dapat mengakses laman *esptpd.pemalangkab.go.id*. lalu masukan Nama pengguna dan Password. Klik tombol gabung atau *Sign in* nanti akan muncul halaman berikutnya, Wajib Pajak hanya perlu mengikuti instruksi-instruksi yang ada, jika Wajib Pajak mengalami kesulitan Wajib Pajak dapat bertanya kepada pihak BAPENDA Kab. Pemalang.

- 3) Setelah melakukan input Wajib Pajak bisa melakukan pembayaran ke Bank Jateng, sebelum diterapkan pelaporan secara *online* Wajib Pajak harus melakukan verifikasi dan validasi dengan datang kembali ke kantor Bapenda untuk menyerahkan lembar ke-1 SSPD, saat ini semua pembayaran pajak yang masuk ke pemerintah daerah Kabupaten Pemalang sudah terkoneksi dan terhitung secara *real time* pada aplikasi E-SIMPATDA.



Gambar 3.16
Alur Pelayanan Wajib Pajak Baru

Sumber : BAPENDA Kab. Pemalang

b. Alur Pelayanan Untuk Wajib Pajak Lama:

Untuk Wajib pajak lama hanya perlu menginput data yang diperlukan pada laman *esptpd.pemalangkab.go.id*. sesuai dengan tata cara yang pernah disosialisasikan pihak Bapenda Kab. Pemalang. Selanjutnya wajib pajak lama dapat melakukan pembayaran pada BPD Jateng dengan membawa cetakan SPTPD atau bisa datang ke Loker Pelayanan Bapenda guna meminta *print out* kode bayar pajak terutang. Pihak BPD Jateng akan memproses pembayaran, jika pembayaran telah berhasil data secara otomatis akan terkoneksi dengan E-SIMPATDA dan wajib pajak akan diberikan kwitansi bukti pembayaran oleh pihak Bank Jateng. Selanjutnya Pihak Bapenda melakukan rekap data pembayaran yang berhasil masuk pada hari itu dan nantinya Petugas Bapenda akan melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan ini dapat didasarkan pada laporan pihak ketiga mengenai kepatuhan dan ketaatan wajib pajak atau atas dasar permintaan wajib pajak itu sendiri karena wajib pajak merasa terdapat kelebihan pembayaran pajak yang menjadi tanggungannya. Pemeriksaan juga akan dilakukan oleh petugas jika wajib pajak tidak melakukan penyampaian SPTPD dalam 3 (tiga) masa pajak berturut-turut serta jika terdapat selisih 50% omzet yang di inputkan oleh wajib pajak dengan hasil pantauan petugas.

Apabila dibandingkan dengan wajib pajak baru, wajib pajak lama tentunya lebih mudah dalam pelaporan SPTPD karena wajib pajak lama telah mendapatkan sosialisasi secara langsung dan seluruh prosesnya dapat dilakukan online di mana saja. Sementara untuk wajib pajak baru harus terlebih dahulu datang ke Bapenda untuk melakukan pendaftaran dan menunggu di berikan Password dan nama pengguna oleh pihak Bapenda untuk *login*, dalam pengisian E-SPTPD juga wajib pajak baru masih membutuhkan bimbingan dari pihak Bapenda.

Wajib pajak lama atau wajib pajak baru keduanya tentu akan menjadi sasaran pemeriksaan. Namun, dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak berhak meminta surat tugas pemeriksaan serta berhak menolak meminjamkan buku atau catatan dan menolak petugas memasuki tempat serta menolak memberikan keterangan. Dengan demikian pajak terutang akan ditentukan secara jabatan ditambah sanksi administrasi sebesar 2 kali jumlah pajak terutang.

Laporan hasil pemeriksaan paling lambat diberikan 15 hari setelah penugasan berakhir. Jika dalam hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang ada jumlah kelebihan diperhitungkan sebagai uang muka pembayaran pajak untuk masa pajak berikutnya. Apabila wajib pajak mengakhiri usahanya, maka jumlah kelebihan pajak akan dikembalikan paling lambat satu bulan sejak diterbitkan ketentuan kelebihan pembayaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kuliah kerja praktik di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Prosedure pelaporan pajak restoran melalui aplikasi E-SPTPD bagi Wajib Pajak baru diwajibkan melakukan pendaftaran usaha terlebih dahulu untuk memperoleh NPWPD, mekanisme pendaftarannya dilakukan secara *offline* di Bapenda Kabupaten Pemalang. Setelah memperoleh ID pengguna dan Password dari pihak Bapenda wajib pajak dapat mengakses *website* esptpd.pemalangkab.go.id dengan menggunakan ID dan Password yang diberikan. Dalam form isian di laman ESPTPD terdapat 11 menu namun wajib pajak hanya perlu mengisi 4 menu utama yaitu NPWPD, omzet, masa dan tahun pajak. Setelah selesai mengisi form isian Wajib pajak dapat mencetak kode bayar untuk melakukan pembayaran pajak di BPD Bank Jateng. Penerapan E-SPTPD pada Proses pelaporan Pajak Daerah sudah efektif dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang selalu melampaui target.
2. Dalam pengimplementasian ESPTPD terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti banyaknya wajib pajak daerah yang belum mengetahui bagaimana cara pelaporan SPTPD secara online karena kurangnya sosialisasi, dan juga pemahaman wajib pajak Kabupaten Pemalang

mengenai pentingnya pembayaran pajak, serta koneksi yang tidak stabil sering kali memutus jaringan sehingga proses pelaporan melalui aplikasi ESPTPD menjadi terhambat, sistem ESPTPD yang sering mengalami error juga menjadi kendala dalam pelaporan ESPTPD.

3. Pengimplementasian suatu program atau kebijakan tentu bertujuan untuk memberi kemudahan dan manfaat bagi masyarakat beberapa manfaat yang didapat dari pengimplementasian ESPTPD diantaranya dapat mengurangi penumpukan berkas fisik seperti kertas dokumen pajak dan dapat mengurangi resiko kehilangan berkas pajak karena berkas sudah tersimpan dalam sistem dengan bentuk *soft file*, dengan pengimplementasian ESPTPD juga proses pelaporan pajak daerah menjadi lebih mudah, lebih efektif dan efisien, manfaat selanjutnya yaitu pada masa pandemi seperti sekarang pelaporan pajak dengan ESPTPD dapat mengurangi kontak langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak atau dengan sesama wajib pajak.
4. Sanksi yang akan dikenakan bagi wajib pajak yang lalai membayar atau melaporkan pajaknya adalah kurungan penjara 2 tahun paling lama dan denda maksimal 4 kali pajak yang menjadi tanggungannya jika wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPTPD dan sengaja membuat kerugian bagi daerah, dan kurungan penjara paling lama 1 tahun bagi wajib pajak yang lalai, memasukkan dengan tidak benar, tidak lengkap dokumen SPTPD, mencantumkan dokumen palsu dan denda maksimal 2 kali besaran pajak yang menjadi tanggungannya.

B. Saran

Menurut kesimpulan yang sudah dijabarkan di atas, saran yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang (BAPENDA) hendaknya secara berkala mengevaluasi pengelolaan pajak di Kabupaten Pemalang. Selain itu Bapenda juga perlu meningkatkan mutu pelayanan terhadap wajib pajak misalnya dengan memperbaiki aplikasi pelaporan pajak yang sering kali mengalami gangguan sehingga menghambat wajib pajak dalam pelaporan. Pihak Bapenda juga perlu mengembangkan lagi aplikasi-aplikasi tersebut menjadi lebih efektif dan efisien lagi, Pihak Bapenda mungkin dapat melakukan kunjungan ke Kantor Pengelolaan Pendapatan Daerah lainnya yang sistemnya sudah lebih maju untuk mengadopsi sistem pelaporan pajak yang lebih modern dari Kantor Pengelolaan Pendapatan daerah lain tersebut.
2. Untuk wajib pajak daerah khususnya wajib pajak baru pajak restoran apabila merasa memiliki keterbatasan pengetahuan dalam proses pelaporan disarankan untuk mendatangi Kantor Bapenda untuk meminta bantuan dan arahan langsung dari petugas pelayanan pajak agar proses penyampaian E-SPTPD dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai petunjuk yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, Dimas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.

Esimpatda.pemalangkab.go.id

Esptpd.pemalangkab.go.id

Febriansyah, Angky. 2019. “Analisis Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung (Studi Kasus Pada badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Di kota Bandung Tahun 2014-2018)” *Jurnal Thesis Universitas Komputer Indonesia*.

Grindle, Marilee S, (ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in The Third World*. Jakarta : Gunung Agung.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru2018*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Muyasyaroh, Ulfiyati. 2019. “Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah Dan Pajak BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Periode 2013-2018”. *Jurnal Skripsi Universitas Pancasakti Tagal*.

Prayogi, Bobby. 2020. “Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-SPTPD Pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Jember”. *Jurnal Thesis Universitas Jember*.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Pemalang.

- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Tedjo, Ratna. 2020. Panduan Aplikasi E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Online. <https://docplayer.info/189627280-Panduan-aplikasi-e-sptpd-elektronik-surat-pemberitahuan-pajak-daerah.html>. (17 Januari 2021).
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Wahyuningsih, Evi, dkk. 2017. “Implementasi Sistem E-Filling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan”. hal : 3-4.
- Hasibuan, Hasrul Anwar, dkk. 2021. “Peningkatan Keamanan penerimaan Pajak Daerah Sumut dalam Peningkatan Mutu Ekonomi Sumut.” Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA) 1.1
- Watini, Sri. 2010. “Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)”. *Universitas Kristen Maranatha*.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sejak Kapan Bapenda Kabupaten Pemalang Menggunakan Aplikasi E-SPTPD untuk Pelaporan Pajak Daerahnya?
2. Bagaimana Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Untuk Wajib Pajak Baru?
3. Mulai kapan WP Baru Bisa Melaporkan Pajaknya Melalui Aplikasi E-SPTPD?
4. Bagaimana Tata Cara Pelaporan Pajak Restoran Melalui Aplikasi E-SPTPD?
5. Berapa besarnya Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran?
6. Ada Berapa Jumlah WP Pajak Restoran Di Kabupaten Pemalang?
7. Apa Saja Kendala dalam Penerapan E-SPTPD di Kabupaten Pemalang?
8. Apa Manfaat Dari Penggunaan Aplikasi E-SPTPD?
9. Sanksi yang dikenakan kepada WP yang tidak melaporkan SPTPDnya?

Lampiran II
Data Wajib Pajak Restoran AGUSTUS 2020

DAFTAR SPTPD PAJAK RESTORAN TAHUN 2020 NO Rekening 4.04.07.00.00.4.1.1.02 Periode 1 September 2020 s/d 30 September 2020				
NO	DATA WAJIB PAJAK	NO & TGL SPTPD	BESAR OMZET	BESARAN PAJAK TERUTANG
	NAMA/ALAMAT/NPWP			
1.	ROCKET CHICKEN PETARUKAN Jl Kartini Kel. Petarukan Kec. Petarukan P 2 0000567 10 08 HP 0877 22436108	8543 01 Sept 2020	Rp26,661,800	Rp2,666,180
2.	SULTAN FRIED CHICKEN Jl Jend Sudirman Timur No.32 Wanarejan Utara Taman P 2 0001251 09 15 Mohammad Nor A. 0895 366452513	8546 01 Sept 2020	Rp3,150,000	Rp315,000
3.	MAKPREEKK Jl A. Yani Selatan No. 6 Kebondalem Pemalang P 2 0000182 08 14 Oky Prasetyo 0813 26896003	8547 01 Sept 2020	Rp5,500,000	Rp550,000
4.	ROCKET CHICKEN RANDUDONGKAL Jl Jend. Sudirman Timur Randudongkal P 2 0000227 07 06 Yuli 0823 22547894	8550 01 Sept 2020	Rp20,984,000	Rp2,098,400
5.	ROCKET CHICKEN BELIK	8551	Rp14,676,800	Rp1,467,680

	Jl Gatot Subroto No 21 Belik P 2 00000100 03 02 Ahmad Maulana 0878 883275878	01 Sept 2020		
6.	WM. BA'SO BALUNGAN KEBOEN PELEM Jl DI Panjaitan Sewaka Pemalang P 2 0000056 08 10 Kiswidiyanto 0878 30656890	8552 02 Sept 2020	Rp2,000,000	Rp200,000
7.	WARUNG TAMAN AGUNG BU RINI Jl Werkudoro Taman Pemalang P 2 0000054 09 21 Bu Rini 0877 64222000	8553 02 Sept 2020	Rp3,000,000	Rp300,000
8.	WAPRESS JK Jl DR. Wahidin Kaligelang Taman P 2 0000078 09 14	8554 02 Sept 2020	Rp4,000,000	Rp400,000
9.	RM MANTEP ROSO Jl raya Petarukan Barat P 2 0000245 10 08	8555 02 Sept 2020	Rp3,500,000	Rp350,000
10.	WM PADANG SABANA AMPERA Jl. A. Yani Utara Mulyoharjo Pemalang P 2 0000039 08 15	8558 02 Sept 2020	Rp4,000,000	Rp400,000
11.	PT SEBASTIAN CITRA INDONESIA/ JEMMY WANTONO (ROTI'O PEMALANG) Jl Veteran No 28 Pelutan Pemalang	8560 02 Sept 2020	Rp19,185,450	Rp1,918,545

	P 2 0001189 00 00 Jemmy Wantono 0816 706631			
12.	CATERING LESTARI Jl Perintis Kemerdekaan No. 20 Beji Taman P 2 0001334 09 16 Hj. Umi Kalsum 0899 7833552	8567 02 Sept 2020	Rp3,120,000	Rp312,000
13.	WINDA SNACK Jl Tarakan II No. 2 Perumnas Bojongbata PML P 2 0001335 08 11 Erwin Jitu Agusta 0878 38985000	8568 02 Sept 2020	Rp5,939,000	Rp593,900
14.	ROCKET CHICKEN PEMALANG 3 Jl Urip Sumoharjo No. 136 Pelutan Pemalang P 2 0001322 08 16 Kusti 0877 50623247	8572 02 Sept 2020	Rp10,954,200	Rp1,095,420
15.	ROCKET CHICKEN MOGA Jl Raya Moga P 2 0000074 01 06 Doni 0852 01443795	8573 02 Sept 2020	Rp17,460,000	Rp1,746,000
16.	ROCKET CHICKEN COMAL Jl A. Yani No. 58 Purwosari Comal P 2 0000052 12 04 Ardisa Arianti 0853 25024085	8579 02 Sept 2020	Rp32,837,700	Rp3,283,770
17.	RM AYAM GEPUK SUPER LEZAT	8580 02 Sept 2020	Rp14,180,000	Rp1,418,000

	Jl Jend. Sudirman Timur No. 2 Wanarejan Selatan Taman P 2 0000728 09 21			
18.	ROCKET CHICKEN PEMALANG 1 Jl Jend. Sudirman No A7 Mulyoharjo Pemalang P 2 0000042 08 15	8583 02 Sept 2020	Rp18,046,700	Rp1,804,670
19.	WM GROMBYANG WARIDIN Jl Gatot Subroto Bojongbata Pemalang P 2 0000978 08 11 Waridin 0823 22111846	8585 03 Sept 2020	Rp2,000,000	Rp200,000
20.	CAFE GITA CORNER DAN GITA RASA Jl Jend Sudirman Timur Wanarejan Selatan Taman P 2 0000570 09 21	8586 03 Sept 2020	Rp2,000,000	Rp200,000
21.	RM MANTEP ROSO Jl Raya Petarukan Barat P 2 0000245 10 08	8587 03 Sept 2020	Rp3,500,000	Rp350,000
22.	PECAK WELUT BU NITI Desa Tegakmlati Kec. Petarukan P 2 0001091 10 15	8589 03 Sept 2020	Rp2,000,000	Rp200,000
23.	RM BINTANG SAUDARA Jl Jend. Sudirman No 318 Pelutan PML P 2 0001285 08 16 Ngadanto 0878 66654143	8590 03 Sept 2020	Rp2,000,000	Rp200,000

24.	WM. MBA IRMA Jl Kenanga No. 6 Pelutan Pemalang P 2 0000071 12 02 Irma 0817 0568024	8591 03 Sept 2020	Rp2,000,000	Rp200,000
25.	WM AYUNDA Sirandu Jl Dr. Cipto Mangunkusumo Mulyoharjo Pemalang Istianah 0812 72299939	8593 03 Sept 2020	Rp3,000,000	Rp300,000
26.	ROCKET CHICKEN PEMALANG 2 Jl Sulawesi Mulyoharjo Pemalang P 2 0000577 08 15	8600 03 Sept 2020	Rp14,985,720	Rp1,498,572
27.	D'FAMILY RESTO Jl Sulawesi No 16 A Bojongbata PML P 2 0000077 08 11	8601 03 Sept 2020	Rp4,075,000	Rp407,500
28.	ROCKET CHICKEN BANJARDAWA Jl Kolonel Sugiono Taman P 2 0000955 09 09 Nur A. P. 0821 36827721	8609 03 Sept 2020	Rp15,528,201	Rp1,552,820
29.	JEJO BOX CAFE Jl A. Yani No. 14 Purwosari Comal P 2 0001181 12 04 Budi H. 0821 23457370	8610 03 Sept 2020	Rp5,130,000	Rp513,000
30.	WKWK CAFE FOOD & DRINK Jl Urip sumoharjo No 133	8619 04 Sept 2020	Rp9,147,000	Rp914,700

	Pelutan PML P 2 0000089 08 16 Irma Ika 0896 96465621			
31.	RM BUMBU IRENG YU SAN Jl Jend Sudirman Timur No 32 Beji Taman P 2 0001117 09 16 Badru Tamam 0812 255603291	8621 04 Sept 2020	Rp13,017,000	Rp1,301,700
32.	RM KEBOEN BAMBU Jl A. Yani No 31A-33A Purwosari Comal P 2 0000046 12 04	8624 04 Sept 2020	Rp2,000,000	Rp200,000
33.	RM KEPITING GEMES PEMALANG Jl Urip Sumoharjo Pelutan Pemalang P 2 0000040 10 06	8625 04 Sept 2020	Rp2,150,000	Rp215,000
34.	RM KEPITING GEMES Jl Raya Iser Petarukan P 2 00000040 10 06	8626 04 Sept 2020	Rp2,100,000	Rp210,000
35.	RM TI-TO-TIE Jl A. Yani Purwosari Comal P 2 0001178 12 04	8627 04 Sept 2020	Rp2,000,000	Rp200,000
36.	WARUNG SATE KENDALDOYONG / TASORI Jl A. Yani No 14 Purwosari Comal P 2 0001228 12 04 Tasori 0877 64291757	8628 04 Sept 2020	Rp2,000,000	Rp200,000
37.	RM. H. UTOMO	8629	TUTUP	-

	Jl Raya Losari Ampelgading P 2 0000051 11 11	04 Sept 2020		
38.	FOOD & BEVERAGES FRENZ Kompleks Sirandu Mall Pemalang P 2 0000116 08 11 Fera Nur H. 0877 64736000	8631 04 Sept 2020	Rp36,650,000	Rp3,665,000
39.	D'TOP BEJI Jl Jend Sudirman Timur (depan Pasar Beji) Beji Taman P2 0001202 09 16 Arman 0819 93295869	8633 04 Sept 2020	Rp6,112,700	Rp611,270
40.	D'TOP PETARUKAN Jl Kartini Petarukan P 2 0001203 10 08	8634 04 Sept 2020	Rp6,102,300	Rp610,230
41.	LESEHAN KALIRAMPUT Desa Mereng Kec. Warungpring P 2 0001276 14 02 Ambarwati 0852 26697001	8635 04 Sept 2020	Rp2,000,000	Rp200,000
42.	ROCKET CHICKEN WARUNGPRING Jl Raya Warungpring No. 24 (Depan Pasar Warungpring) P 2 0001157 14 02 Wawan W. 0896 66019893	8636 06 Sept 2020	Rp10,838,250	Rp1,083,825
43.	ROCKET CHICKEN BANTARBOLANG Jl Raya Bantarbolang RT 02 RW 05 Bantarbolang P 2 0001224 06 11	8637 06 Sept 2020	Rp10,732,850	Rp1,073,285

44.	WAROENG KPK Jl Dr.Cipto Mangun Kusumo Mulyoharjo Pemalang P 2 0000659 08 15	8641 07 Sept 2020	Rp3,000,000	Rp300,000
45.	THE WINNER RESTO Jl A. Yani Selatan No 1-3 Mulyoharjo Pemalang P 2 0000008 08 15	8648 07 Sept 2020	Rp4,150,000	Rp415,000
46.	WM GROMBYANG WARIDIN Jl Gatot Subroto Bojongbata Pemalang P 2 0000978 08 11	8649 07 Sept 2020	Rp2,000,000	Rp200,000
47.	PURIMAS 3 CAKE & BAKERY Jl Jend. Sudirman No 285 Mulyoharjo Pemalang P 2 0000038 08 15 Rudi H. 0877 31082212	8652 07 Sept 2020	Rp12,008,500	Rp1,200,850
48.	YOGYA RESTAURANT (FOOD COURT) Jl Jend. Sudirman No 94 Pelutan Pemalang P 2 0000033 08 16 Linus K. 0857 2341 6661	8665 07 Sept 2020	Rp37,460,493	Rp3,746,049
49.	SANTANA BISTRO Jl Jend. Sudirman Timur No. 52 Mulyoharjo Pemalang P 2 0000043 08 15 Iwan Agus P 0284 321852	8668 07 Sept 2020	Rp26,000,000	Rp2,600,000
50.	LESEHAN ALDAN / SULIYANTO Jl Jend. Sudirman Timur No	8675 07 Sept 2020	Rp24,273,000	Rp2,427,300

	83 Wanarejan Selatan Taman P 2 0000076 09 21 Moh. Najib 0821 37025702			
51.	RM. LESEHAN BAMBOE IJO Jl Raya Pantura Km 18 Jatirejo Ampelgading P 2 0000034 11 13 Rifki R 0812 26172747	8679 07 Sept 2020	Rp5,710,000	Rp571,000
52.	RM CONDONG RAOS PAK KARDI Jl A. Yani Kebondalem Pemalang P 2 0001090 08 14	8694 08 Sept 2020	Rp2,000,000	Rp200,000
53.	RM BOJONGRESTO Jl Sumber Bojongbata Pemalang P 2 0000457 08 11	8695 09 Sept 2020	Rp2,000,000	Rp200,000
54.	MILKMAX MILKSHAKE Jl Dr. Cipto Mangunkusuma Mulyoharjo Pemalang P 2 0000102 08 14	8698 09 Sept 2020	Rp8,770,000	Rp877,000
55.	LOCOMOTIFE CAFE Jl Sulawesi Mulyoharjo Pemalang P 2 0001076 08 15	8705 09 Sept 2020	Rp4,000,000	Rp400,000
56.	DON TEA Jl KH Samanhudi No 1 Pelutan PML P 2 001101 08 14	8713 09 Sept 2020	Rp17,211,000	Rp1,721,100
57.	CFC (YOGYA MALL PEMALANG)	8745 09 Sept 2020	Rp46,531,982	Rp4,653,198

	Jl Jend. Sudirman No.94 Pelutan Pemalang P 2 0000063 08 16			
58.	PUTRI KAMBOJA 47 CATERING Jl Kamboja No.47 Pelutan Pemalang P 2 0000037 08 16 Kusiyam 0284 3251 83	8751 10 Sept 2020	Rp2,405,000	Rp240,500
59.	RM SAMBEL LAYAH Jl Pemuda No. 19 Mulyoharjo PML P 2 0000045 08 15 Titi 0812 2803 8035	8764 14 Sept 2020	Rp5,105,000	Rp510,500
60.	RM SOTO SEDAAP BOYOLALI Jl urip SumoharjoNo 182 RT 4 Rw 5 Pelutan Pemalang P 2 0000044 08 16	8778 16 Sept 2020	Rp74,538,000	Rp7,453,800
61.	RM LAYAH WATOE Jl Pemuda No 40 Mulyoharjo Pemalang P 2 0001002 08 15	8780 16 Sept 2020	Rp2,500,000	Rp250,000
62.	AYAM GEPREK SA'I COMAL Jl Stasiun No 76 Purwosari Comal P 2 0000829 1204 Aji 0813 27668700	8784 18 Sept 2020	Rp7,782,500	Rp778,250
63.	CV IEFFADIA RT 04 RW 02 Kauman Comal P 2 0000067 12 18	8859 29 Sept 2020	Rp81,431,340	Rp8,143,134

64.	CV IEFFADIA RT 04 RW 02 Kauman Comal P 2 0000067 12 18 Abdul Mukti 0819 1148 4347	8860 29 Sept 2020	Rp94,129,780	Rp9,412,978
Jumlah Total				Rp83.327.126

Lampiran III

Lembar Surat Pendaftaran Objek Pajak Restoran

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 63 TAHUN 2020
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN
PEMALANG

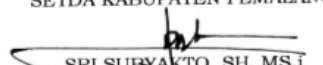
FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH PAJAK RESTORAN

FORM PENDAFTARAN WAJIB PAJAK/RETRIBUSI (Diisi Petugas)			
Tanggal Pendaftaran	<input type="text"/>		
Jenis Pendaftaran	<input type="text"/>	Bidang Usaha	<input type="text"/>
Nomor Pendaftaran	<input type="text"/>		

FORM PEMILIK			
NIK/NPWP	<input type="text"/>		
Nama	<input type="text"/>		
Jalan	<input type="text"/>		
RT	<input type="text"/>	RW	<input type="text"/>
Kecamatan	<input type="text"/>	Kelurahan	<input type="text"/>
Kabupaten	<input type="text"/>		
No. Telp./HP.	<input type="text"/>		ex : 08
Email	<input type="text"/>		
Kode Pos	<input type="text"/>		

Tambah Objek Pajak			
Jenis Objek	<input type="text"/>	No.	<input type="text"/>
Tgl. Daftar	<input type="text"/>		
Nama	<input type="text"/>		
Jalan	<input type="text"/>		
Kecamatan	<input type="text"/>	RT/RW	<input type="text"/>
Kelurahan/Desa	<input type="text"/>		
Kabupaten	<input type="text"/>		
No. Telp/HP	<input type="text"/>	Kode Pos	<input type="text"/>
Penanggungjawab			
Nama	<input type="text"/>		
Alamat	<input type="text"/>		
Gambar Objek	<input type="text"/>		
<div style="display: flex; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="button" value="Peta"/> <input type="button" value="Satelit"/> </div>			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

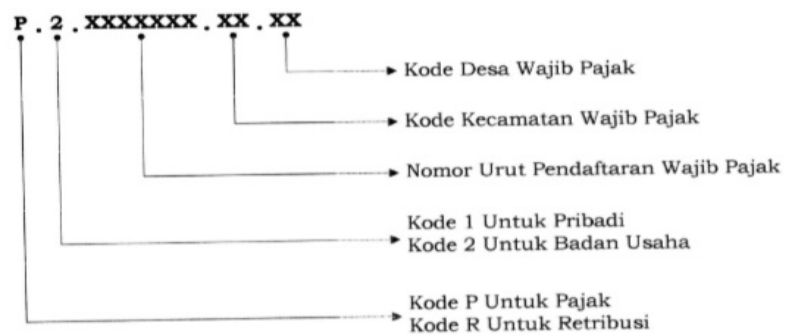
JUNAEDI

Lampiran IV

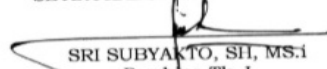
Ketentuan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 63 TAHUN 2020
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN
 PEMALANG

KETENTUAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 SRI SUBYAKTO, SH, MS.1
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
 ttd

JUNAEDI

Lampiran V


Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Surohadikusumo No.1, Pemalang Telp/Fax (0284) 321244, Pemalang Kode Pos 52312	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTORAN No SPTPD : 12179 Masa Pajak : 01-05-2021 S/D 31-05-2021 Tahun Pajak : 2021 Kode Bayar : 27020121012179	Kepada Yth. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Jl. Surohadikusumo No.1, Pemalang
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkai 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. 4. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi dan menyerahkan SPTPD, pengenaan pajak akan dihitung secara jabatan (Official Assesment) dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.	
I. Identitas Wajib Pajak a. Nama Wajib Pajak : WAPRESS JK b. Alamat : Jl. dr wahidin kab. pemalang c. NPWPD : <input type="text" value="P"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> d. Nama Objek / Usaha : WAPRESS JK e. Alamat Objek : Jl. dr. wahidin Kel. Kaligelang Kec. Taman Kab. Pemalang	
II. Diisi Oleh Pengusaha Restoran a. Klasifikasi Usaha <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> 01. Restoran 04. Katering 02. Rumah Makan / Warung Makan 05. Jasa Boga 03. Cafe 06. Lainnya	
b. Pembayaran makanan dan minuman	Rp. 2.000.000
c. Pembayaran lain - lain	Rp. -
d. Dasar pengenaan pajak (DPP) (b + c)	Rp. 2.000.000
e. Pajak terutang (10% x DPP)	Rp. 200.000
f. Pajak kurang atau lebih bayar	Rp. -
g. Sanksi administrasi	Rp. -
h. Jumlah pajak yang dibayar (e + f + g)	Rp. 200.000
Data Pendukung	
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	* Ada/Tidak Ada
b. Rekapitulasi Penjualan/Omzet	* Ada/Tidak Ada
c. Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill	* Ada/Tidak Ada
d. Jumlah Harian	* Ada/Tidak Ada
e.	* Ada/Tidak Ada
III. Pembayaran/Penyetoran di Bank Jateng Kabupaten Pemalang	
IV. Lain-lain Kegiatan :	
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar - benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.	
Pemalang, 16 Juni 2021 WAPRESS JK	Diterima oleh petugas, Tanggal, DRS. SUNANDARISMAN 196210011992021003

* Coret yang tidak perlu
 Lembar 1. Untuk BAPENDA 2. Untuk Wajib Pajak

Lampiran VI

Surat Setoran Pajak Daerah

 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Surohadikusumo No.1, Pemalang Telp/Fax (0284) 321244, Pemalang Kode Pos 52312		SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun : 2020 Kode Bayar : 27020120009748	
Nama Wajib Pajak : YOGYA RESTAURANT (FOOD COURT) Alamat : Jl. Jend Sudirman No.94 Nama Objek / Usaha : YOGYA RESTAURANT (FOOD COURT) Alamat Objek : Jl. Jend Sudirman No.94 Kel. Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang NPWPD : <input type="text" value="P"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> Menyetor Berdasarkan : <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> SKPDT <input checked="" type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK Keberatan Masa Pajak : 01-11-2020 S/D 30-11-2020 Tahun : 2020 No. Urut : 8080			
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
		<u>Pajak Restoran</u>	
1.	4.1.1.02.01.	Jenis : Restoran Omzet : 71.378.580 Tarif : 10% Pajak : 7.137.858	Rp. 7.137.858
JUMLAH SETORAN PAJAK			Rp. 7.137.858
Dengan Huruf :		Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah	
Ruang Untuk Teraan Kas Register/ Tanda Petugas Penerima DRS. SUNANDARISMAN 196210011992021003		Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : 07-12-2020 Tanda Tangan : Nama Terang : NIP :	Pemalang, 07 Desember 2020 Penyetor, YOGYA RESTAURANT (FOOD COURT)

Lampiran VII

Surat Tagihan Pajak Daerah

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 63 TAHUN 2020
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN
PEMALANG

FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Jl. Surohadikusumo No.1, Pemalang Telp/Fax (0284) 321244,
Pemalang

Pemalang, 20

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Surat Tagihan Pajak Daerah

Yth. Sdr / Pemilik / Pengelola
Di
(NPWP)

SURAT TAGIHAN

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Nama, Nomor & Tanggal SPTPD, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD, SKRDT, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			Denda	
			Jumlah	

Dengan huruf : (.....)

Sehubungan dengan tersebut, Kami mohon Saudara melunasi pajak sesuai uraian diatas ke Bank Jateng baik melalui teller ataupun transfer dengan kode bayar :

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemalang, 20

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH PEMALANG
KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN

(.....)
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,



Cap
ttd

SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembirja Tk. I
NIP. 19650218 199203 1 006

JUNAEDI

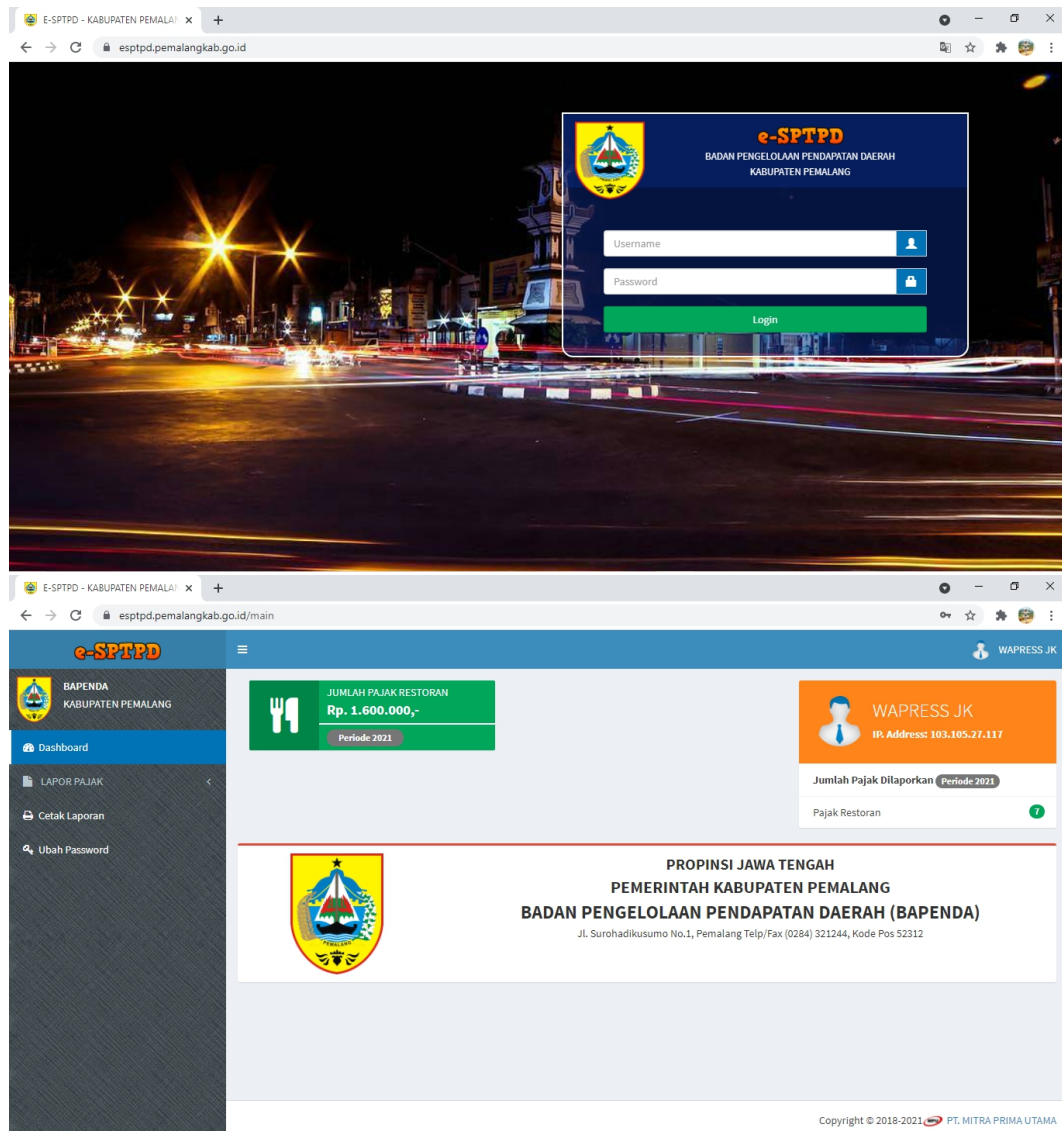
Lampiran VIII

Lembar Kode Bayar

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Surohadikusumo No.1, Pemalang Telp/Fax (0284) 321244, Pemalang</p>	<p>Kode Bayar</p>  27020121012179
<p>NPWPD : P.2.0000078.09.14 Nama : WAPRESS JK Alamat : Jl. Dr Wahidin Kel. Kaligelang Kec. Taman Kab. Pemalang Nama Objek : WAPRESS JK Alamat Objek : Jl. Dr. Wahidin Kel. Kaligelang Kec. Taman Kab. Pemalang Masa Pajak : 01-05-2021 s/d 31-05-2021 Jatuh Tempo : 07-06-2021 Jumlah Pembayaran : Rp. 200.000,00 Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah</p>	
<p><i>* Apabila dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</i> <i>* Silahkan lakukan pembayaran di Loker/ATM Bank Jateng</i></p>	

Lampiran IX

Laman E-SPTPD



Lampiran X

Laman E-SIMPATDA



Lampiran XI
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
JL. SUROHADIKU SUMO NO.1, PEMALANG Telp/Fax (0284) 321244, Pemalang 52312

REALISASI BULAN APRIL TAHUN 2021

Kode Rekening	Jenis Penerimaan	Target Anggaran	Realisasi			%
			s/d Bulan lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	71.521.800.000,00	9.206.537.489,00	213.881.919,00	9.420.419.408,00	13,17
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	71.521.800.000,00	9.206.537.489,00	213.881.919,00	9.420.419.408,00	13,17
4.1.1.01	Pajak Hotel	497.000.000,00	143.454.300,00	40.738.000,00	184.192.300,00	37,06
4.1.1.01.04...	Hotel Bintang Tiga	0,00	46.255.000,00	8.582.800,00	54.837.800,00	0,00
4.1.1.01.05...	Hotel Bintang Dua	0,00	4.803.500,00	1.325.300,00	6.128.800,00	0,00
4.1.1.01.06...	Hotel Bintang Satu	0,00	1.950.000,00	650.000,00	2.600.000,00	0,00
4.1.1.01.07...	Hotel Melati Tiga	0,00	20.600.000,00	7.350.000,00	27.950.000,00	0,00
4.1.1.01.08...	Hotel Melati Dua	0,00	13.943.000,00	4.349.000,00	18.292.000,00	0,00
4.1.1.01.09...	Hotel Melati Satu	0,00	51.487.800,00	16.710.900,00	68.198.700,00	0,00
4.1.1.01.12...	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	0,00	4.415.000,00	1.770.000,00	6.185.000,00	0,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.025.000.000,00	262.145.652,00	66.665.896,00	328.811.548,00	32,08
4.1.1.02.01...	Restoran	0,00	129.337.287,00	41.625.646,00	170.962.933,00	0,00
4.1.1.02.02...	Rumah Makan	0,00	54.155.730,00	18.234.100,00	72.389.830,00	0,00
4.1.1.02.03...	Cafe	0,00	17.092.142,00	4.391.100,00	21.483.242,00	0,00
4.1.1.02.04...	Kantin	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00
4.1.1.02.05...	Katering	0,00	55.285.493,00	215.050,00	55.500.543,00	0,00
4.1.1.02.06...	Warung Makan	0,00	6.075.000,00	2.000.000,00	8.075.000,00	0,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	201.000.000,00	37.614.827,00	12.768.875,00	50.383.702,00	25,07
4.1.1.03.07...	Karaoke	0,00	19.029.527,00	6.276.625,00	25.306.152,00	0,00
4.1.1.03.10...	Permainan Billiard	0,00	170.000,00	60.000,00	230.000,00	0,00
4.1.1.03.15.02	Permainan Ketangkasan (Anak-Anak)	0,00	13.982.500,00	5.590.000,00	19.572.500,00	0,00
4.1.1.03.19...	Pertandingan Olahraga	0,00	2.619.300,00	381.000,00	3.000.300,00	0,00
4.1.1.03.20...	Kolam Renang	0,00	1.813.500,00	461.250,00	2.274.750,00	0,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.275.000.000,00	522.159.298,00	45.796.763,00	567.956.061,00	44,55
4.1.1.04.01...	Papan/Billboard/Videootron/Megatron	0,00	453.793.197,00	43.875.086,00	497.668.283,00	0,00
4.1.1.04.02...	Reklame Kain	0,00	48.704.601,00	1.916.677,00	50.621.278,00	0,00
4.1.1.04.03...	Reklame Melekat/Stiker	0,00	19.132.500,00	0,00	19.132.500,00	0,00
4.1.1.04.04...	Reklame Selebaran	0,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00

1/2

Go to Se